



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



APBN UNTUK MENGATASI KESENJANGAN EKONOMI



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Surabaya, 25 April 2018

POLITIK DAN KEBIJAKAN EKONOMI

Politik (lembaga dan kebijakan) mempengaruhi kinerja ekonomi
Di sisi lain...

Kebijakan ekonomi mempengaruhi kinerja politik

Faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja ekonomi adalah kestabilan politik dan hukum.

Namun...

Kesuksesan politik sering didasarkan pada kebijakan ekonomi yang sehat (Inklusif, berkelanjutan, dan bertanggungjawab)



Tidak seperti kebijakan moneter (yg independen), kebijakan fiskal merupakan domain kekuasaan eksekutif. Pemerintahan saat ini dapat menentukan visi, tujuan, dan teknis dari kebijakan fiskal (**Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan**).

POKOK BAHASAN



ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA NEGARA

- APA DAN BAGAIMANA
- FUNGSI DAN PERAN



KONDISI PEREKONOMIAN TERKINI

- GLOBAL
- DOMESTIK



DUKUNGAN FISKAL UNTUK PEMERATAAN



KINERJA PENGELOLAAN KEBIJAKAN FISKAL



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- Apa dan Bagaimana**
- Fungsi dan Peran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Apa itu?

Rencana keuangan tahunan Pemerintah yang disusun secara sistematis dan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran

Dasarnya?

- UUD 1945 Amandemen 4
- UU No. 17 Tahun 2003
- UU No. 1 Tahun 2004

Mekanisme?

- Disusun oleh Pemerintah
- Dibahas bersama DPR
- Disetujui oleh DPR

Kapan?

16 Agustus setiap tahunnya

TIGA FUNGSI APBN

Alokasi

Mengalokasikan (membagikan) pendapatan yang diterima dari masyarakat untuk dikembalikan kepada masyarakat luas melalui belanja produktif.

Program : *Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial*



Distribusi

Memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat. Menarik dari kelompok yang mampu ke kelompok yang kurang mampu.

Program : *Pajak progresif, PPN barang mewah, Program Keluarga Harapan, subsidi non tunai.*



Stabilisasi

Menjaga stabilisasi perekonomian nasional dari tekanan eksternal maupun internal

Program: Menyesuaikan anggaran subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat.



AMANAT KONSTITUSI

Ekonomi yang mendukung kegiatan:



1

Memajukan Kesejahteraan Umum :

Mengurangi kemiskinan & pengangguran, Mengatasi kesenjangan, Membangun dari pinggiran



2

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa :

Meningkatkan akses pendidikan, Peningkatan Riset + Teknologi dan Inovasi, Menciptakan penduduk yang sehat



3

Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia :

Mendukung penegakan hukum, menjaga kedaulatan wilayah, menciptakan pemerintahan yang efektif dan bersih.



4

Menciptakan Keadilan Sosial :

Mengurangi ketimpangan antar pendapatan dan antar wilayah

APBN sebagai Jangkar Perekonomian



IKLIM INVESTASI
SUPPORTIF



DAYA BELI
MASYARAKAT TERJAGA

PENDAPATAN

- Pemberian insentif perpajakan pada sektor-sektor strategis
- Menyesuaikan Batas Pendapatan Tidak Kena Pajak dengan kondisi masyarakat
- Memberikan kelonggaran bea impor pada produk-produk bahan baku

BELANJA

- Pembangunan infrastruktur
- Memberikan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan
- Menjaga daya beli masyarakat kelompok rentan: subsidi listrik, LPG
- Investasi jangka panjang kualitas SDM

PEMBIAYAAN

- Investasi pada BUMN yang terkait dengan program prioritas
- Penerbitan ORI untuk pendalaman pasar keuangan domestik
- Pengelolaan utang pemerintah yang produktif

PROSES PENYUSUNAN APBN MERUPAKAN SINERGI SEMUA PIHAK



Teknokrat

- Analisa data dan kondisi ekonomi
- Prioritas Pembangunan
- Desain penerimaan, belanja, dan pembiayaan



Politis

- Janji politik
- proses kabinet
- proses DPR dan DPD
- proses daerah



Tata Kelola

- Kecepatan vs *governance*
- *Transparansi & akuntabilitas*
- Kepatuhan vs Pragmatis



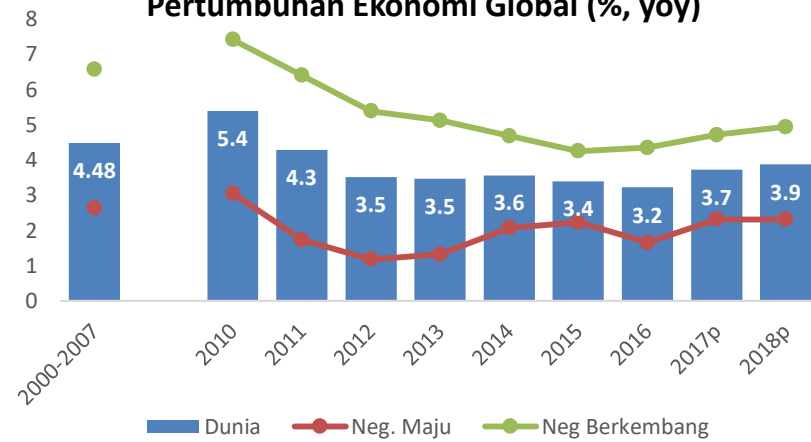
Kondisi Perekonomian Terkini

- Global**
- Domestik**

KINERJA EKONOMI GLOBAL DALAM 6 TAHUN MASIH BERADA DI TINGKAT YANG LEMAH

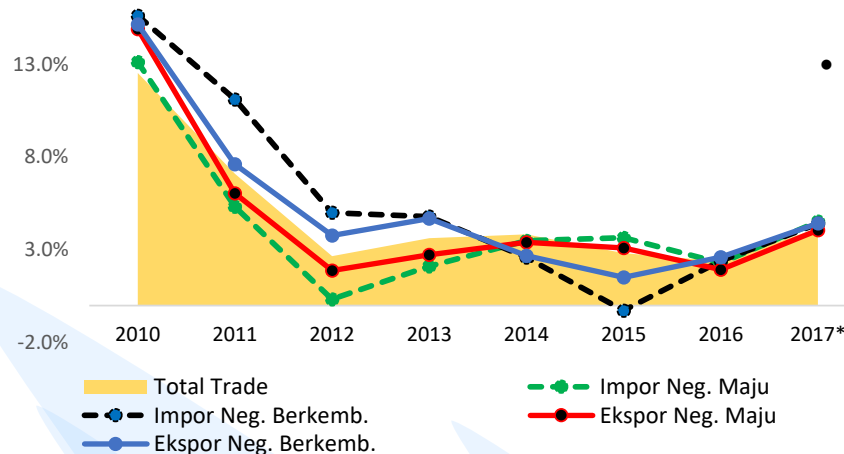
Sumber tekanan berawal dari kinerja negara-negara maju dan berlanjut ke negara-negara berkembang

Pertumbuhan Ekonomi Global (% , yoy)



Sumber : WEO, Jan 2018, IMF, diolah

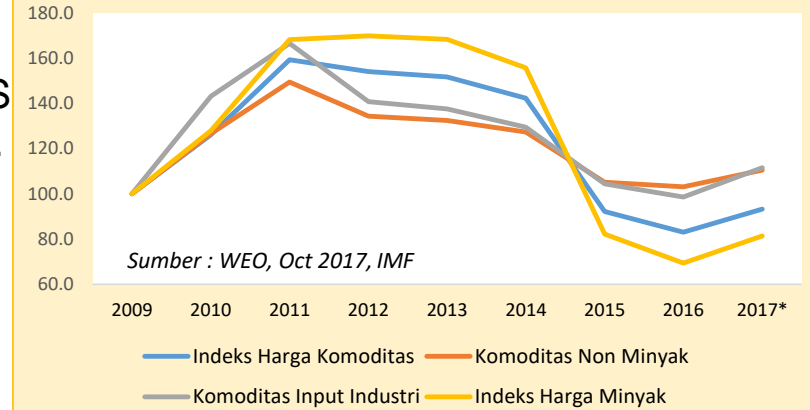
Volume Perdagangan Dunia (yoy)



Sumber : WEO, Oct 2017, IMF

- Pelemahan ekonomi dunia pada periode 2010 hingga 2012 terutama disebabkan oleh kinerja ekonomi negara-negara maju.
 - ✓ Dampak krisis *Subprime Mortgage* di AS berimbas pada gejolak pasar keuangan.
 - ✓ Berbagai kebijakan stimulus ditempuh banyak negara maju (*bail out* Pemerintah, *quantitative easing*).
 - ✓ Krisis utang publik terjadi di beberapa negara Eropa, diawali oleh bailout Yunani.
 - ✓ Melemahnya permintaan negara maju menyebabkan penurunan impor negara-negara maju dari mitra negara-negara berkembang.
- Sejak tahun 2013, sumber perlambatan ekonomi global bergeser dan lebih disebabkan kinerja negara berkembang.
 - ✓ Penurunan kinerja ekspor negara berkembang.
 - ✓ Perubahan model ekonomi Tiongkok dari *investment led* menjadi *consumption led growth*.
 - ✓ Harga minyak mulai menurun antara lain dikarenakan booming produksi *shale oil* di AS serta penurunan permintaan.

Indeks Harga Komoditas Global (2009=100)



Sumber : WEO, Oct 2017, IMF

Dinamika global pada periode “commodity boom” turut mempengaruhi kinerja ekonomi berbagai negara di dunia

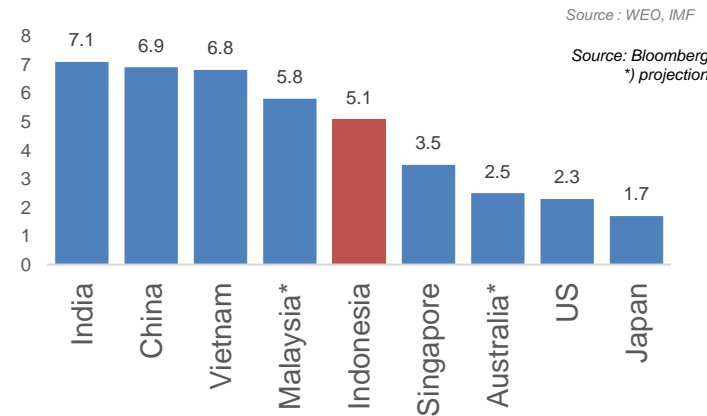
- Terjadi peningkatan harga komoditas dunia pada periode 2010-2012 yang didorong permintaan yang tinggi di EM.
- Periode *commodity boom* mulai berakhir di 2014 seiring dengan lemahnya perekonomian dan permintaan dunia.
- Sejak pertengahan 2016, perbaikan harga komoditas sudah mulai terlihat didorong peningkatan permintaan serta adanya kesepakatan pembatasan produksi minyak oleh negara OPEC.

PEREKONOMIAN GLOBAL MENUNJUKKAN POTENSI PERBAIKAN

Namun tantangan masih berat terutama dari ketidakpastian kebijakan

- Pemulihan kondisi global telah nampak sejak pertengahan 2016 didorong oleh kelompok negara maju.
- Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
- Meskipun prospek jangka pendek cukup baik, ketidakpastian masih tinggi terutama bersumber dari proteksionisme, normalisasi kebijakan negara maju, dan tensi geopolitik

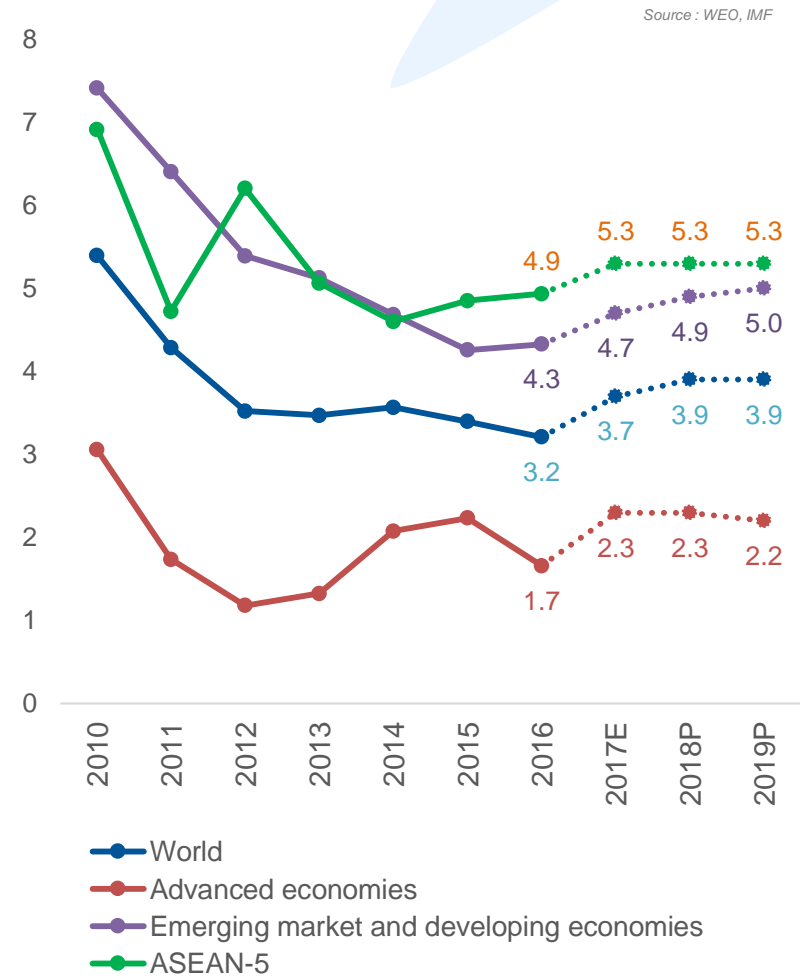
Pertumbuhan Ekonomi 2017 (% , yoy)



Indikator Harga Global



Proyeksi Ekonomi Global (% , yoy)



TANTANGAN PEREKONOMIAN

Kinerja perekonomian global membaik, namun masih menghadapi risiko



Kebijakan Amerika Serikat
Trumpnomics dan potensi peningkatan proteksionisme

Secular Stagnation
Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan



Proses Brexit
Perubahan struktur ekonomi dan politik di kawasan EU

Rebalancing Tiongkok
Berpotensi merubah pola permintaan dan penawaran global



Normalisasi Kebijakan Moneter
Peningkatan suku bunga dapat mendorong *capital flight* dari *emerging market*

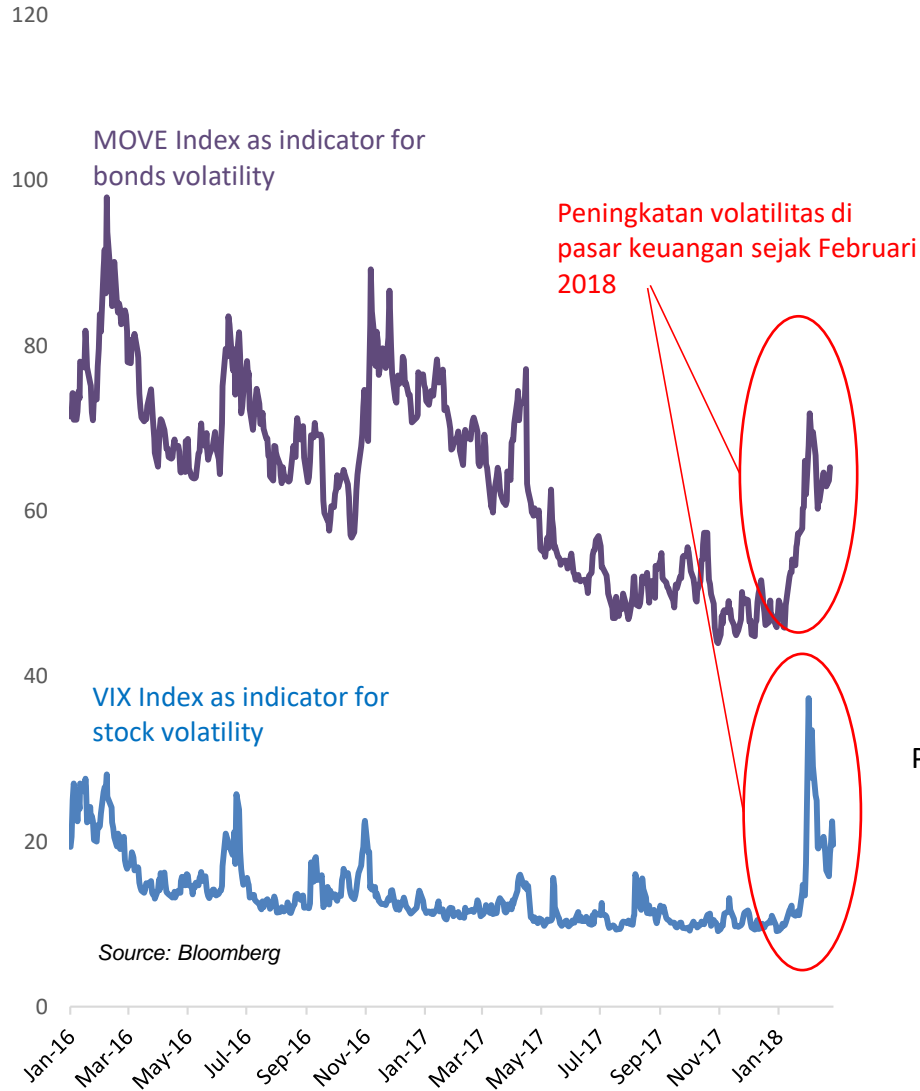
Risiko Geopolitik
Korea Utara, Konflik Timur Tengah, ISIS, Arab Spring, perubahan kepemimpinan di EU



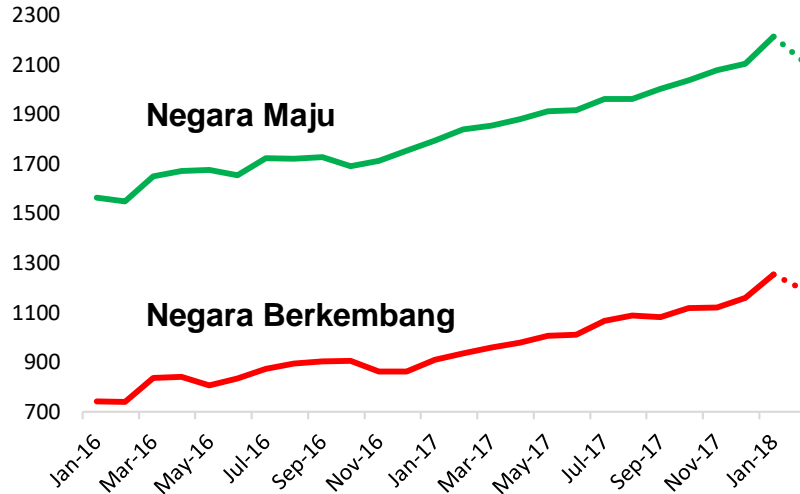
PERKEMBANGAN AWAL 2018: TEKANAN DI SEKTOR KEUANGAN

Dampak sentimen kebijakan ekonomi AS (kenaikan suku bunga the FED dan proteksionisme)

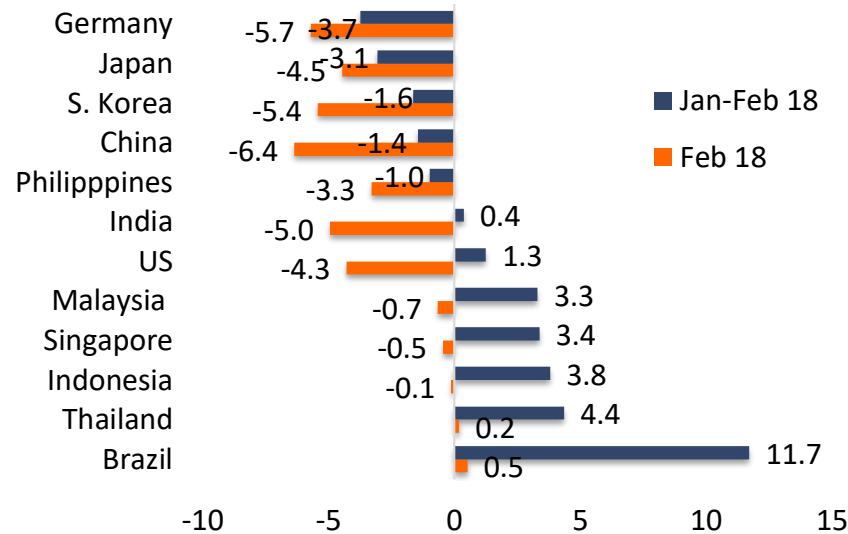
VIX and MOVE Indices



MSCI (Stock) Index



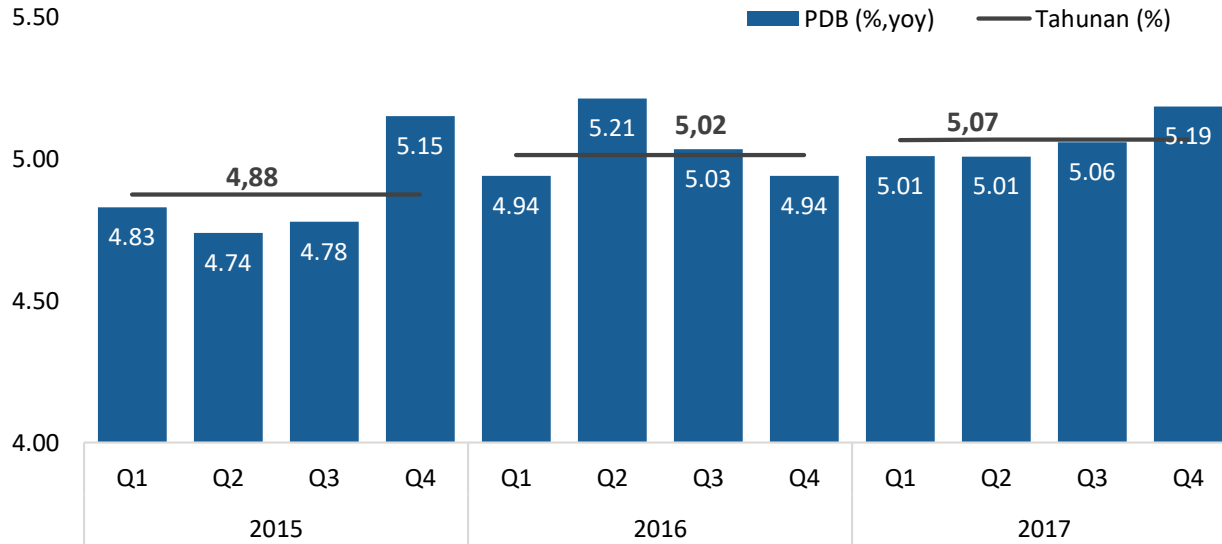
Pergerakan Saham (%)



- Tekanan pada perekonomian global di awal tahun 2018 terjadi pada sektor keuangan, diakibatkan berbagai sentimen yang terkait dengan kebijakan negara maju.
 - Di awal Februari 2018, penegasan rencana kenaikan suku bunga the FED sebanyak 4 kali tahun ini menciptakan volatilitas di pasar keuangan, di tengah kekhawatiran inflasi yang akan meningkat (sejak November 2017, tingkat inflasi di AS berada di atas 2 persen).
 - VIX Index dan MOVE Index sempat bergerak cukup tajam dalam satu hari mencerminkan volatilitas pasar saham dan pasar obligasi yang tinggi.
 - Berbagai saham global mencatatkan koreksi cukup tajam dalam waktu yang singkat (Dow Jones sempat terkoreksi hingga 4,6% dalam satu hari).
 - Selama Februari 2018, secara agregat saham negara maju dan berkembang (MSCI Index) melemah masing-masing 4.3% dan 4.7%.
- Sentimen negatif pada pergerakan pasar keuangan global berlanjut di awal Maret terdampak dari rencana penerapan tarif bea masuk oleh AS terhadap aluminium dan baja.

PERTUMBUHAN PDB INDONESIA

Pertumbuhan secara tahunan terus membaik, tahun 2017 mencapai 5,07%

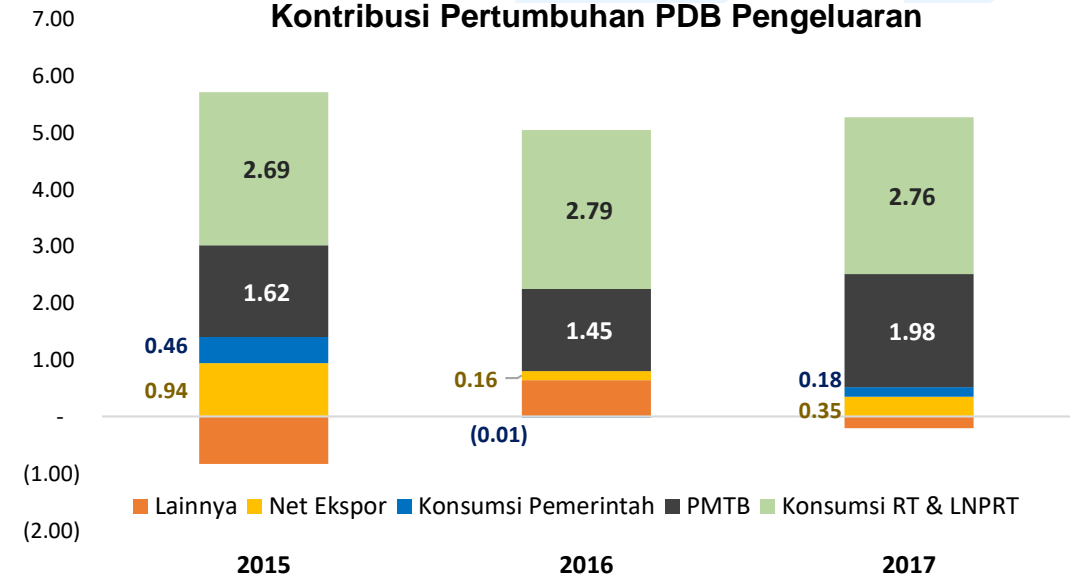


Pertumbuhan PDB Sektoral

SEKTOR	2015	2016	2017
Primer <i>Pertanian dan Pertambangan</i>	0,79	2,40	2,59
Sekunder <i>Industri, Listrik, Gas, Air, dan Konstruksi</i>	4,82	4,58	4,95
Tersier <i>Perdagangan, Transportasi, Infokom, Jasa Keuangan, dan Jasa-Jasa Lainnya</i>	5,45	5,66	5,68

- Sisi Produksi: seluruh sektor tumbuh positif, sektor sekunder mengalami peningkatan pertumbuhan tertinggi yang didorong oleh sektor konstruksi. Sementara perbaikan harga komoditas mendorong kinerja sektor primer.

Kontribusi Pertumbuhan PDB Pengeluaran

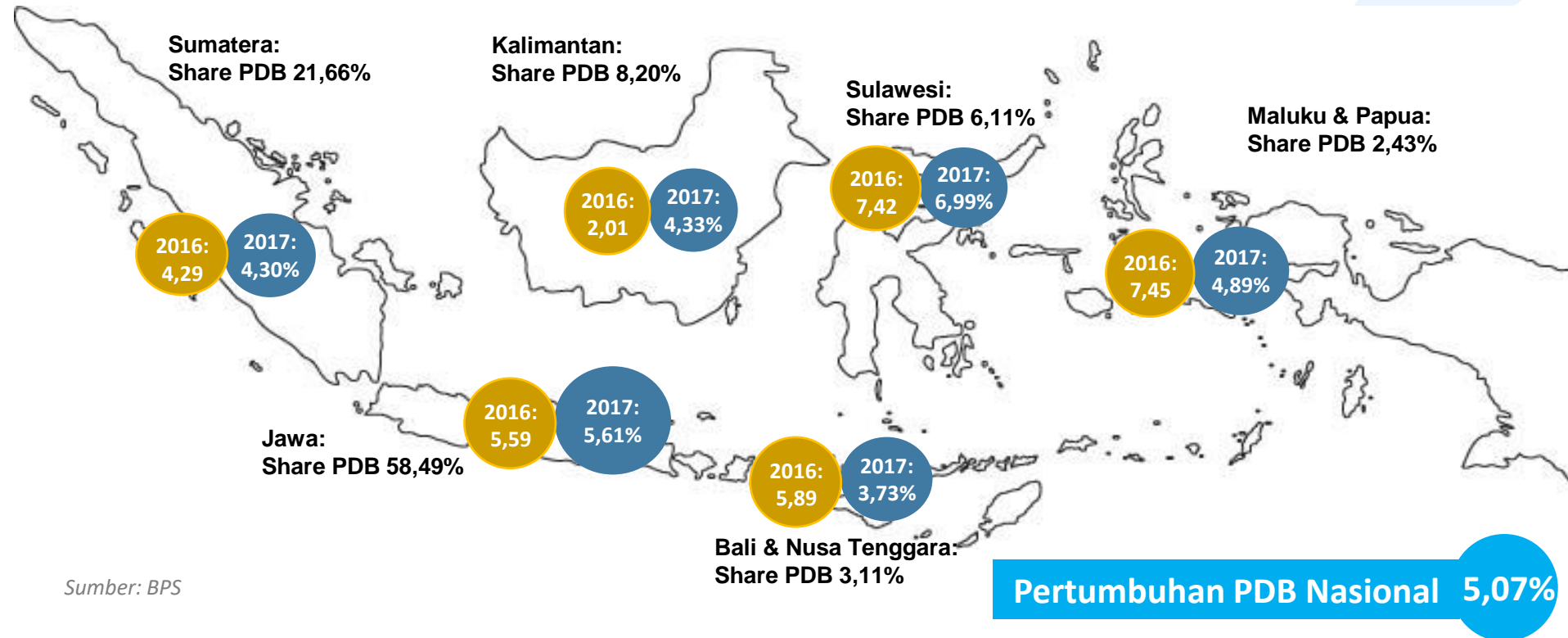


➤ Sisi Pengeluaran:

- Konsumsi rumah tangga dan LNPRT memberikan kontribusi terbesar namun sedikit menurun dibandingkan tahun 2016.
- Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Mengindikasikan adanya pergeseran ke arah struktur pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif.
- Ekspor dan impor mampu kembali tumbuh cukup tinggi setelah mengalami kontraksi dalam beberapa tahun terakhir → memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perekonomian.

PERTUMBUHAN EKONOMI SPASIAL

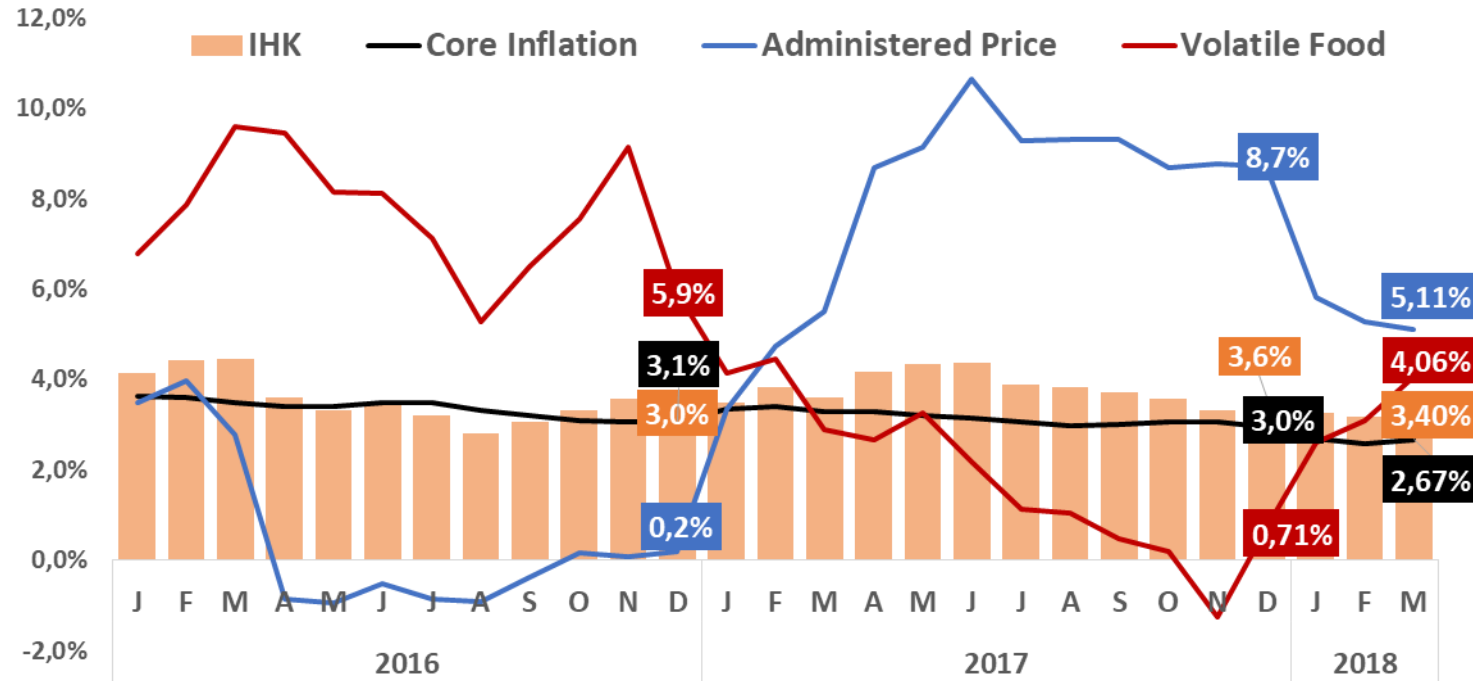
Seluruh kawasan mengalami pertumbuhan ekonomi positif di tahun 2017



- Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2017 masih didominasi oleh wilayah Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,49 persen, didukung oleh pertumbuhan sektor industri.
- Wilayah Sumatera tumbuh relatif stabil sejalan dengan harga komoditas CPO yang masih relatif tinggi.
- Wilayah Maluku dan Papua tumbuh cukup tinggi didukung perbaikan sektor pertambangan (khususnya mineral logam) yang mulai mengalami ekspansi sejak 2016.

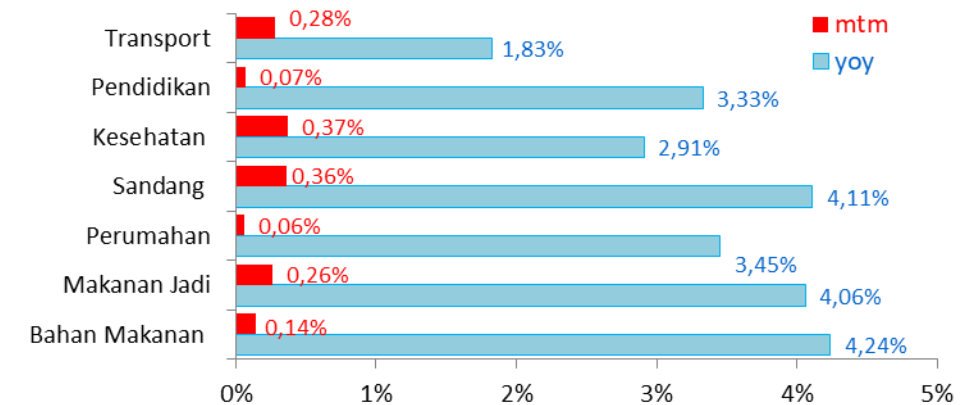
INFLASI MARET 2018 SEBESAR 0,20% (MTM) ATAU 0,99% (YTD) ATAU 3,40% (YOY)

Laju inflasi terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas hortikultura dan kenaikan *Pertalite*



- Inflasi Maret 2018 dipengaruhi oleh faktor cuaca dan terlambatnya izin impor bawang putih yang menyebabkan terbatasnya pasokan komoditas hortikultura (cabai dan bawang). Di sisi lain, terjadi deflasi pada beras, ikan segar, serta telur dan daging ayam ras.
- Komponen inti masih dalam kisaran 2,7% sejak awal 2018, meskipun secara bulanan bergerak naik seiring dengan mulai meningkatnya harga komoditas global.
- Komponen *administered price* mengalami tren menurun sejak Juli 2017 seiring tidak adanya kebijakan harga energi. Namun demikian, meningkatnya harga minyak dunia memicu kenaikan harga bensin (*Pertalite*).

Inflasi *mtm* dan *yoy* bulan Maret 2018



Inflasi Maret 2018 (%)

YoY Rata-rata YoY

IHK 3,40 3,28

Core Inflation 2,67 2,65

Administered Price 5,11 5,40

Volatile Food 4,06 3,26

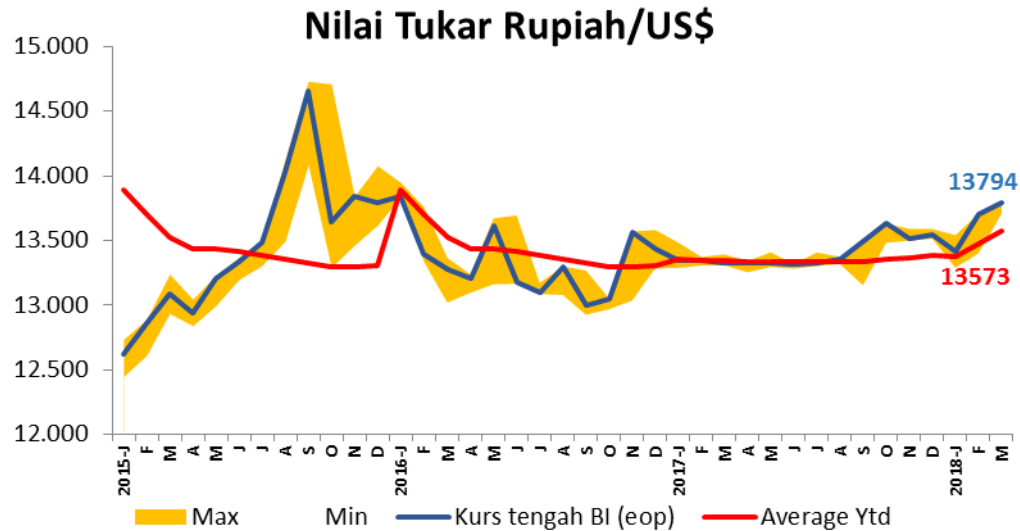
Kelompok Bahan Pengeluaran

Andil Inflasi (mtm)

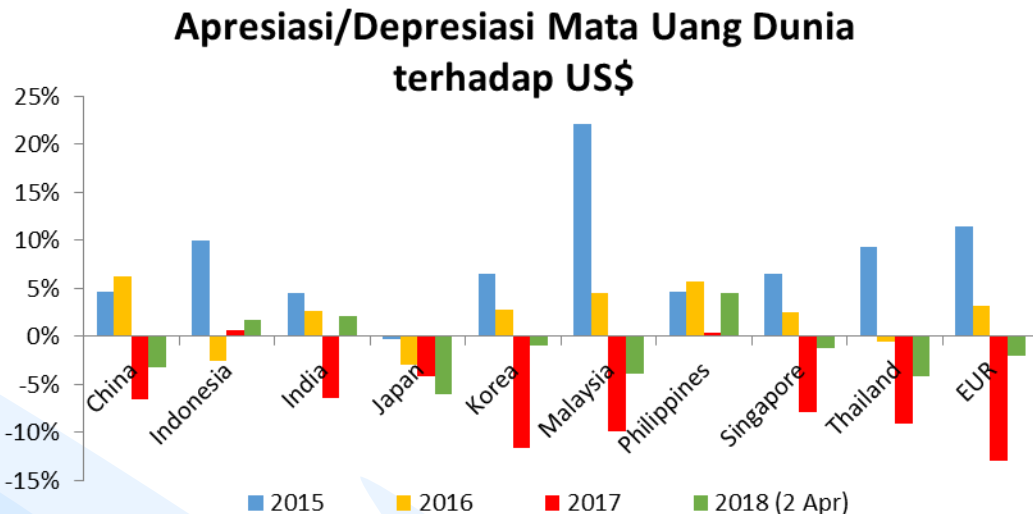
Bahan Makanan	0,05%
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau	0,04%
Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	0,01%
Sandang	0,02%
Kesehatan	0,02%
Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga	0,01%
Transpor, Komunikasi, & Jasa Keuangan	0,05%

DALAM DUA TAHUN TERAKHIR, NILAI TUKAR RUPIAH/US\$ CENDERUNG MENGUAT

Volatilitas Rupiah/US\$ cenderung menurun didukung kondisi ekonomi domestik yang stabil



Sumber : Bank Indonesia, diolah

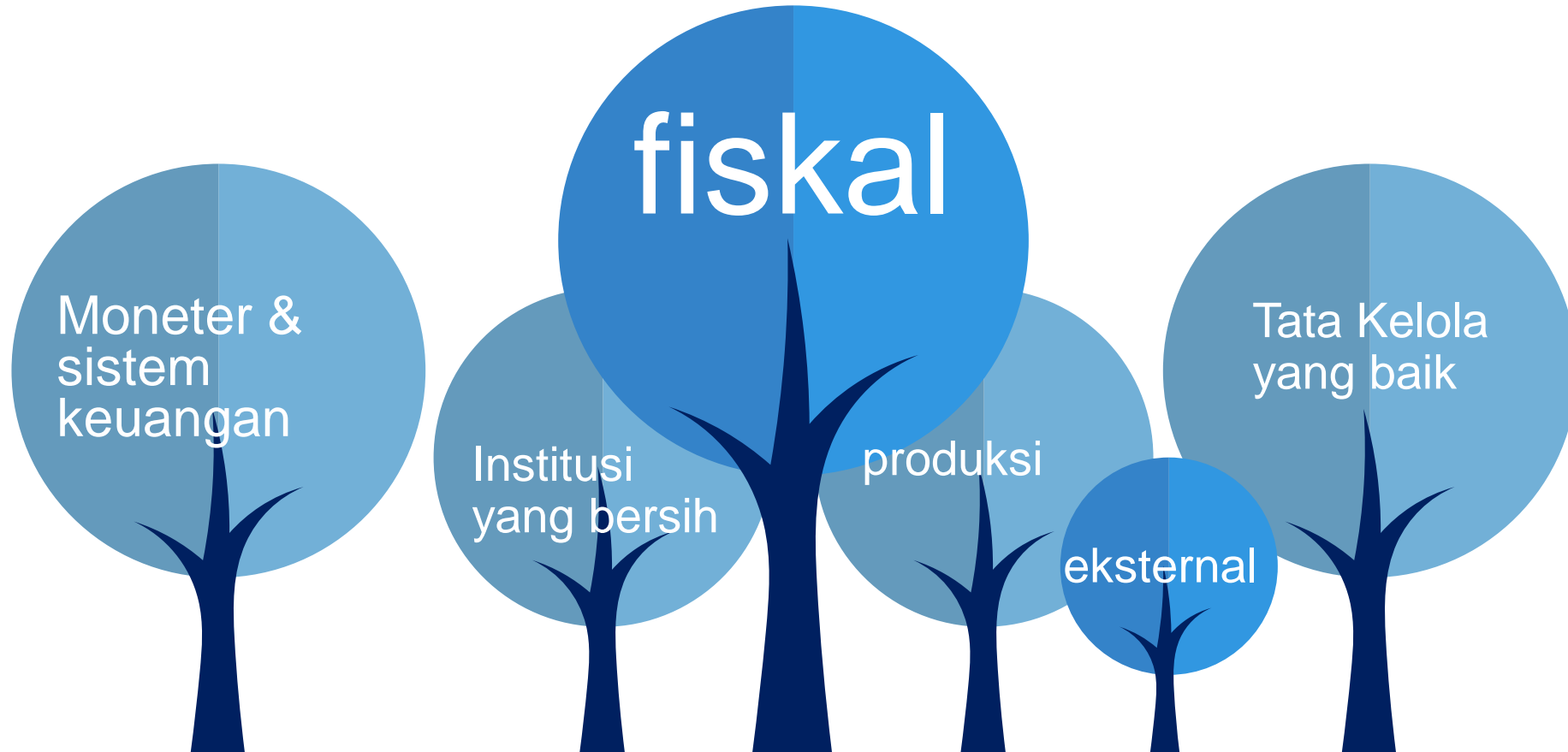


Sumber : Bloomberg, diolah

- Di tahun 2015, nilai tukar Rupiah (dan juga mata uang dunia lainnya) mengalami tren pelemahan terhadap US\$.
 - ✓ Membaiknya kinerja ekonomi AS mendorong the Fed untuk meningkatkan suku bunga FFR. Pada saat yang sama, suku bunga di banyak negara maju lain (Jepang dan Kawaan Eropa) masih tetap dipertahankan stabil untuk mendorong kinerja ekonomi yang belum membaik.
- Di tahun 2016-2017, faktor ketidakpastian di pasar global menurun
 - ✓ Isu kenaikan FFR tidak menimbulkan gejolak sebesar tahun sebelumnya dan sudah diantisipasi pasar sebelum terjadi.
 - ✓ Tingkat suku bunga di negara Eropa masih negatif menyebabkan daya tarik investasi di EM, dan Indonesia.
- Perbaikan kinerja ekonomi domestik mendorong sentimen positif investor.
 - ✓ Terjaganya inflasi, berjalannya program-program infrastruktur, *capital inflow* yang didorong program *tax amnesty*.
 - ✓ perbaikan posisi neraca perdagangan khususnya sejak akhir kuartal 2016 yang menopang penguatan cadangan devisa.
 - ✓ Perbaikan kinerja ekonomi dan iklim usaha yang terus berlanjut di 2017 berdampak pada nilai tukar rupiah semakin terjaga dan pada 8 bulan pertama stabil di kisaran Rp13.300 per US\$.

DIPERLUKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL DAN DOMESTIK

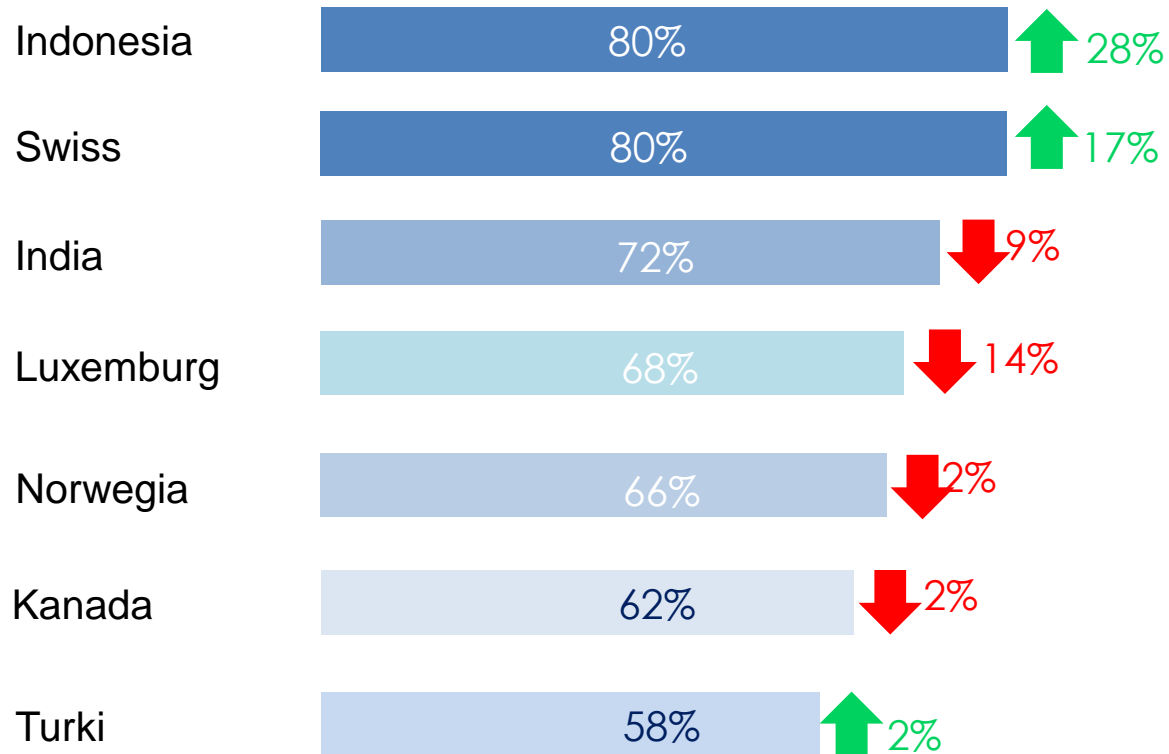
ekonomi inklusif



INDONESIA ADALAH SALAH SATU NEGARA DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERTINGGI



Indonesia bersama dengan Swiss meraih predikat negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kepada Pemerintah berdasarkan survey Gallup World Poll



Beberapa faktor pendorong tingkat kepercayaan publik:

- ✓ Kepercayaan Pada Presiden
- ✓ Pembangunan Infrastruktur
- ✓ Perbaikan Sistem Pajak
- ✓ Pembangunan Fasilitas Sosial
- ✓ Pemberantasan Korupsi
- ✓ Stabilitas Politik

BERBAGAI PENCAPAIAN ATAS REFORMASI EKONOMI & STRUKTURAL

Perbaikan *creditworthiness*, *doing business*, hingga kepercayaan pada pemerintah

Ease of Doing Business 2018

naik

19

Posisi Indonesia naik dari 91 menjadi 72, dan Indonesia masuk dalam jajaran *Top Improvers*. Saat ini posisi Indonesia berada di atas India, Brazil, dan Philippines

peringkat

Investment Grade dari Moody's

Baa2

Kini Indonesia sudah mendapat peringkat *investment grade* dari seluruh lembaga rating: S&P, Moody's, Fitch, JCRA, & R&I.

Galup World Poll

Indonesia bersama dengan Swiss meraih predikat negara dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi kepada Pemerintah

#1

IPM DAN PISA SCORE INDONESIA 2015

IPM meningkat namun masih tertinggal dari negara lain

- 69,55
- 70,9 tahun
- 7,95 tahun
- 12,72 tahun
- Rp 10.420.000

IPM

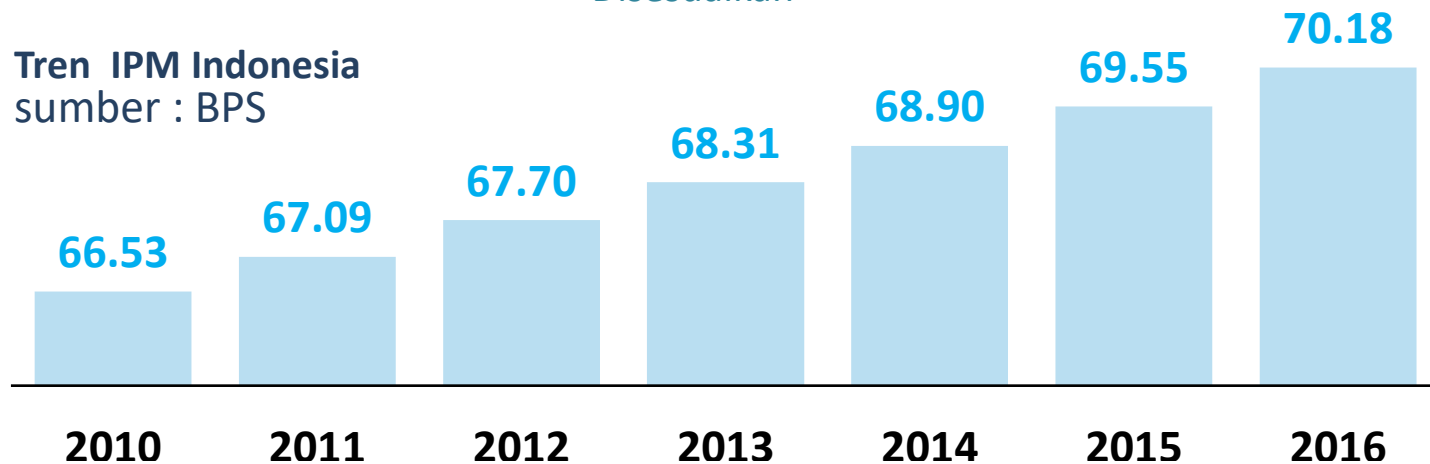
Angka Harapan
Hidup saat Lahir

Rata-rata Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah

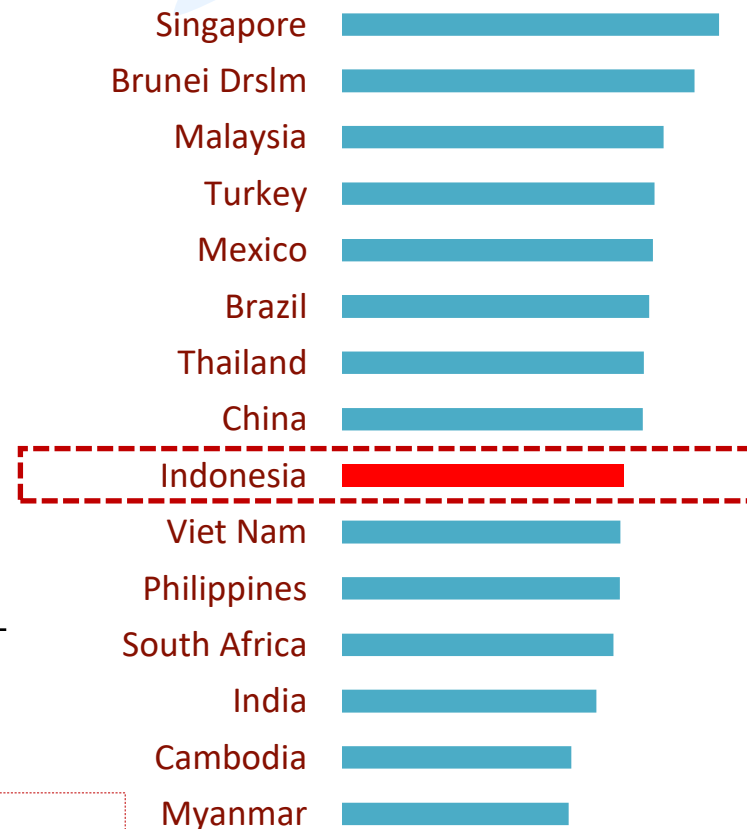
Pengeluaran per Kapita per tahun yang
Disesuaikan

Tren IPM Indonesia
sumber : BPS



Human Development Index 2015

sumber : UNDP



Walaupun **meningkat**, Indonesia **masih tertinggal** baik dalam hal harapan hidup, pendidikan dan pembangunan manusia secara umum.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN SOSIAL MENUNJUKAN PERBAIKAN namun akselerasi penurunan kemiskinan & ketimpangan perlu dioptimalkan

Pengentasan Kemiskinan



Tingkat Kemiskinan (%)

Target 2018

9,5% - 10%

Penurunan Ketimpangan



Indeks GINI ratio

Target 2018

0,38

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing



Tingkat Pengangguran (%)

Target 2018

5% - 5,3%

TANTANGAN

- Akses pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi orang miskin
- Perubahan iklim → harga pangan
- Disparitas akses permodalan
- Akses pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi orang miskin
- Kondisi geografis
- Perubahan ekonomi → struktur lapangan kerja
- *Skill mismatch*
- *4th Industrial Revolution* (automasi, *artificial intelligence*)

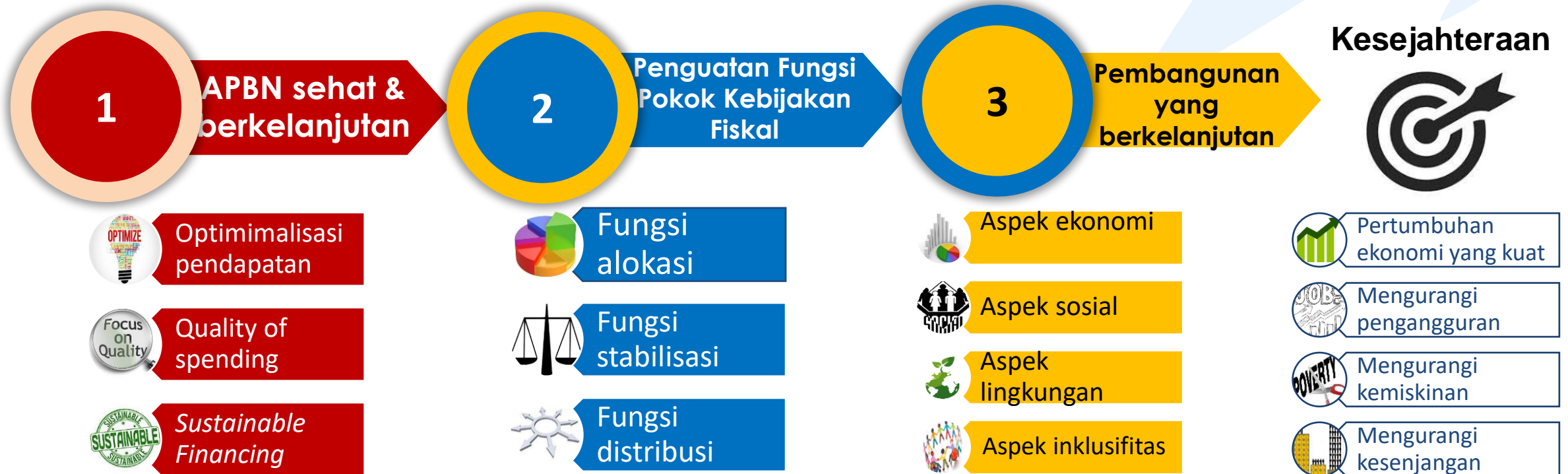


DUKUNGAN FISKAL UNTUK PEMERATAAN

APBN SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEWUJUDKAN "MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR"



STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN

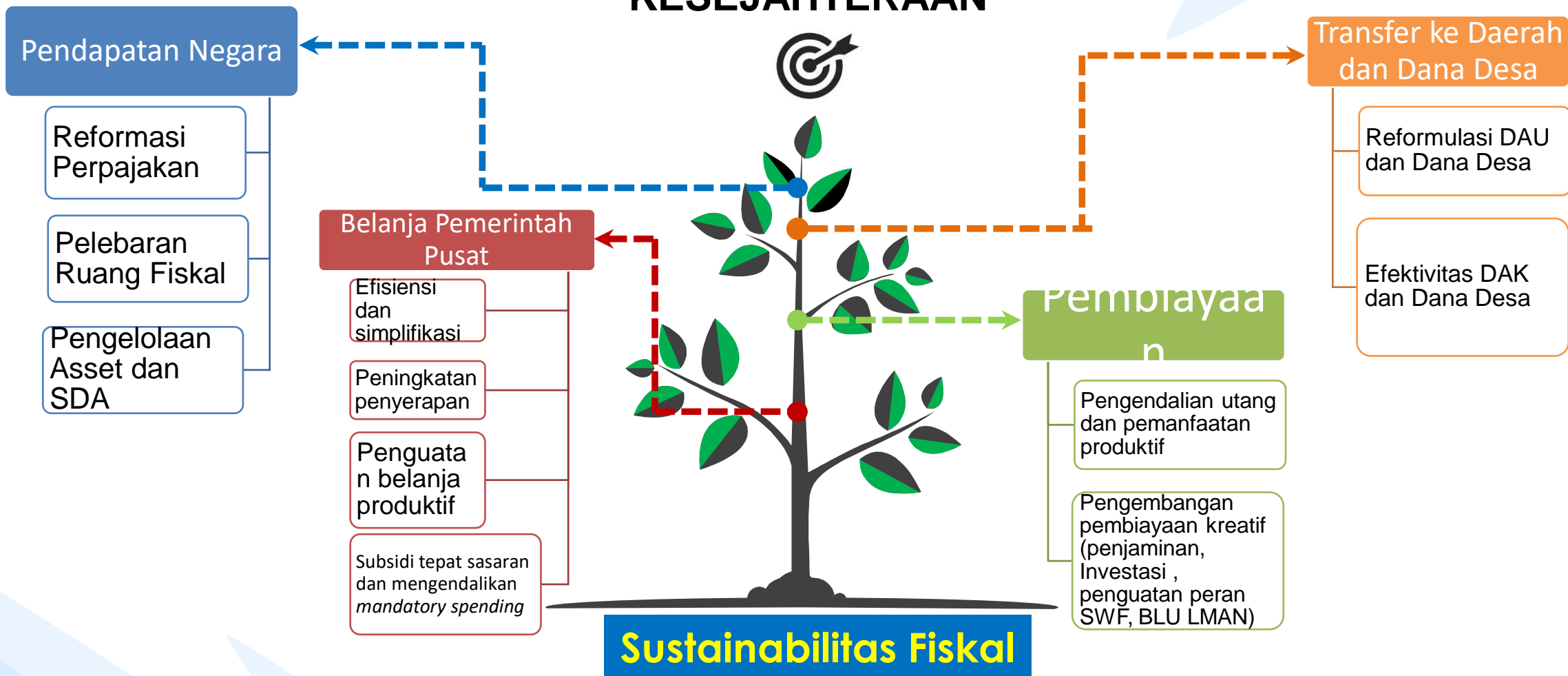


- **APBN yang sehat merupakan fondasi** untuk mewujudkan kesejahteraan
- Melalui APBN yang sehat akan **mendorong 3 Fungsi Pokok Kebijakan Fiskal berjalan optimal** yang selanjutnya akan dapat **menopang pembangunan yang berkelanjutan** dalam rangka mewujudkan **kesejahteraan yang berkeadilan**.

TANTANGAN PENGELOLAAN FISKAL

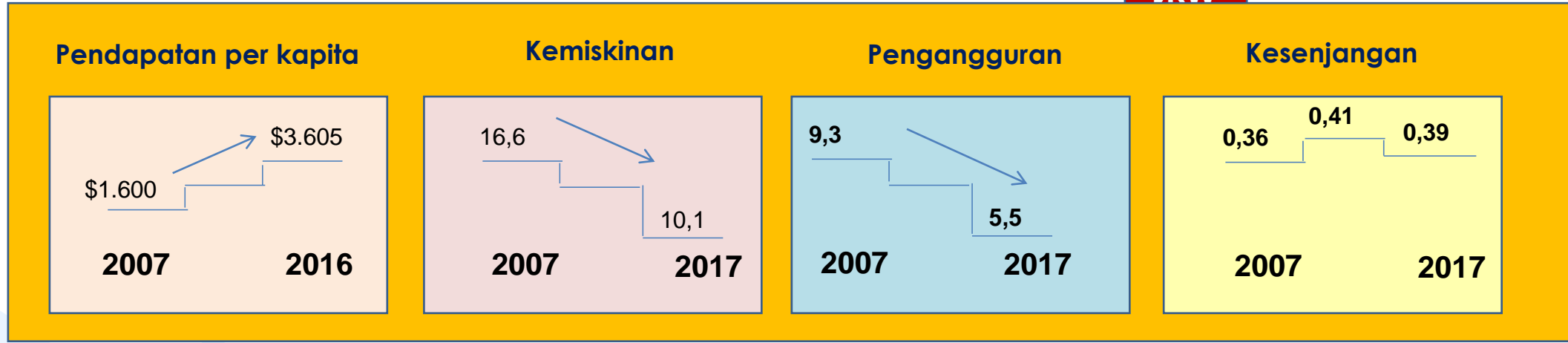
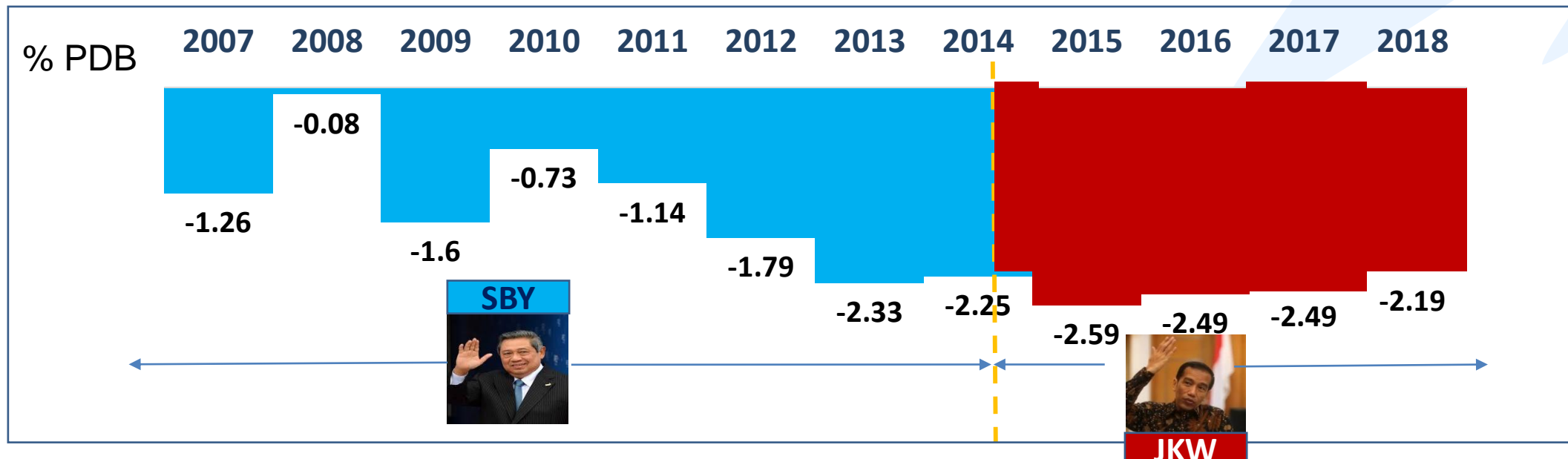
Mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan

KESEJAHTERAAN



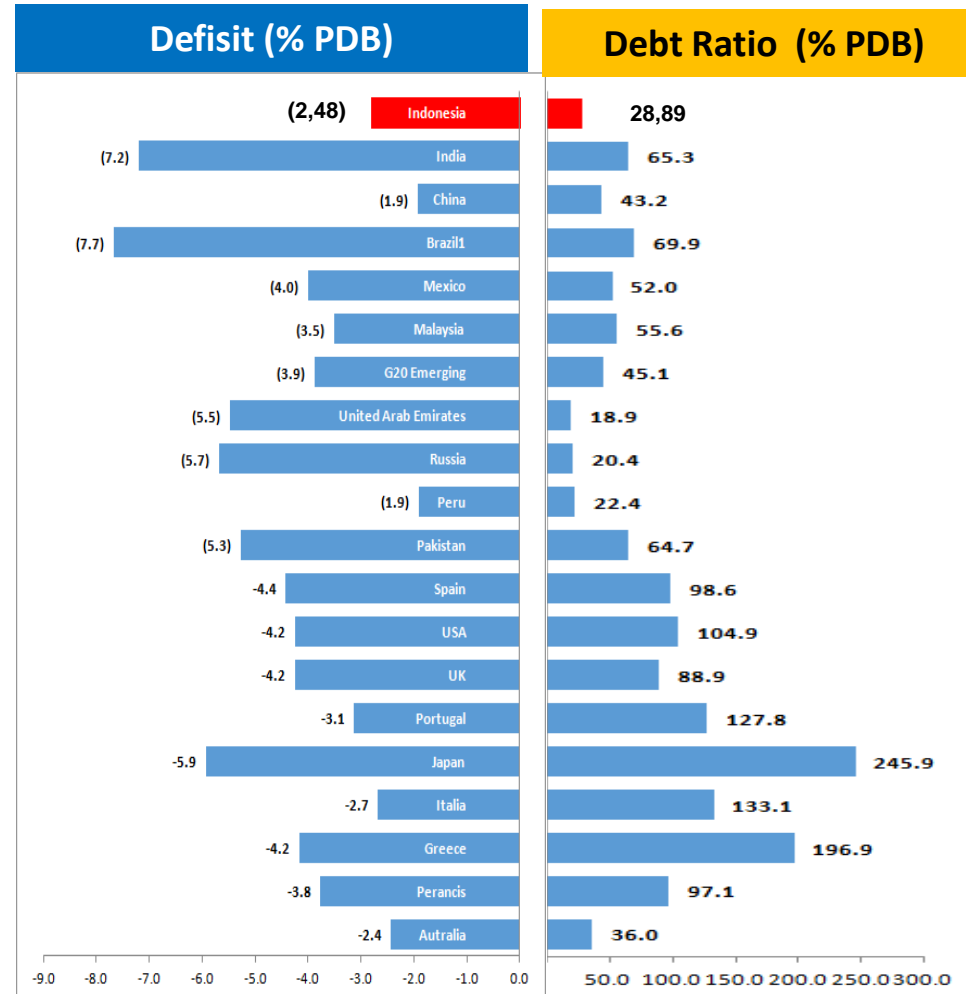
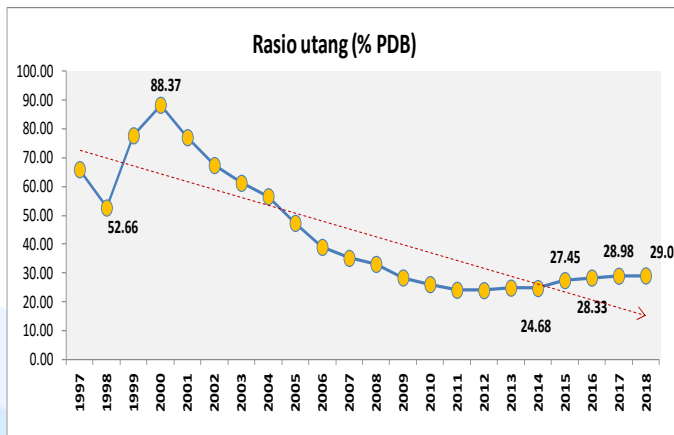
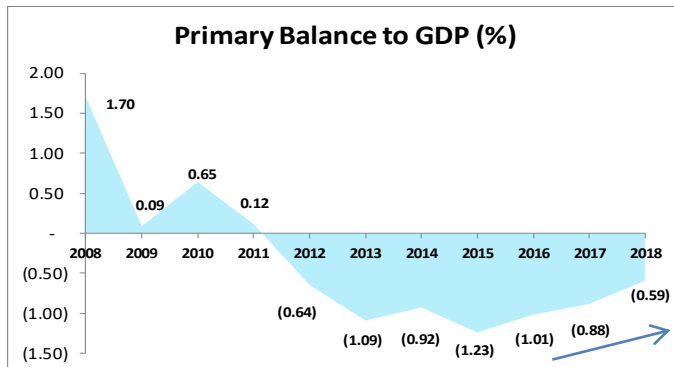
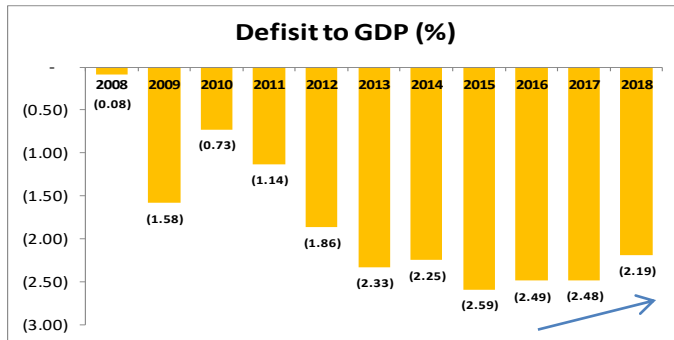
KEBIJAKAN EKSPANSIF

Defisit yang diikuti perbaikan indikator kesejahteraan



KEBERLANJUTAN FISKAL MASIH TERJAGA

Defisit dan Rasio utang terkendali serta keseimbangan primer menuju positif



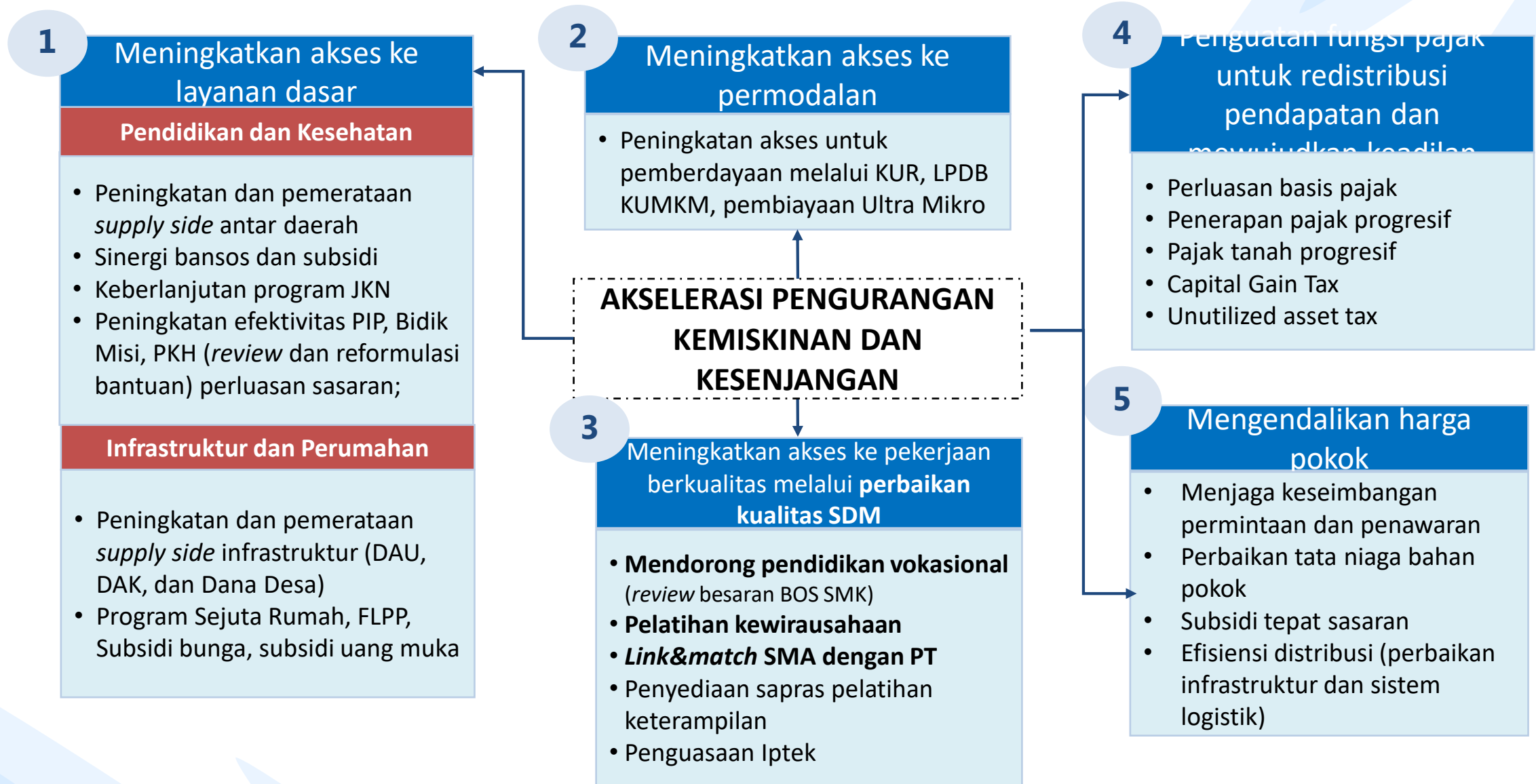
Sumber : Fiscal Monitoring IMF

1. Keberlanjutan Fiskal masih terjaga:

- Defisit 3 tahun terakhir cenderung menurun dan terkendali dibawah 3% PDB;
- Trend Rasio utang 10 tahun menurun, walaupun kembali meningkat tahun 2015, namun masih terkendali dalam batas aman (dibawah 30% PDB);
- Defisit keseimbangan primer 3 tahun terakhir sudah menurun.

2. Dibandingkan beberapa negara, Defisit dan rasio utang Indonesia masih relatif rendah;

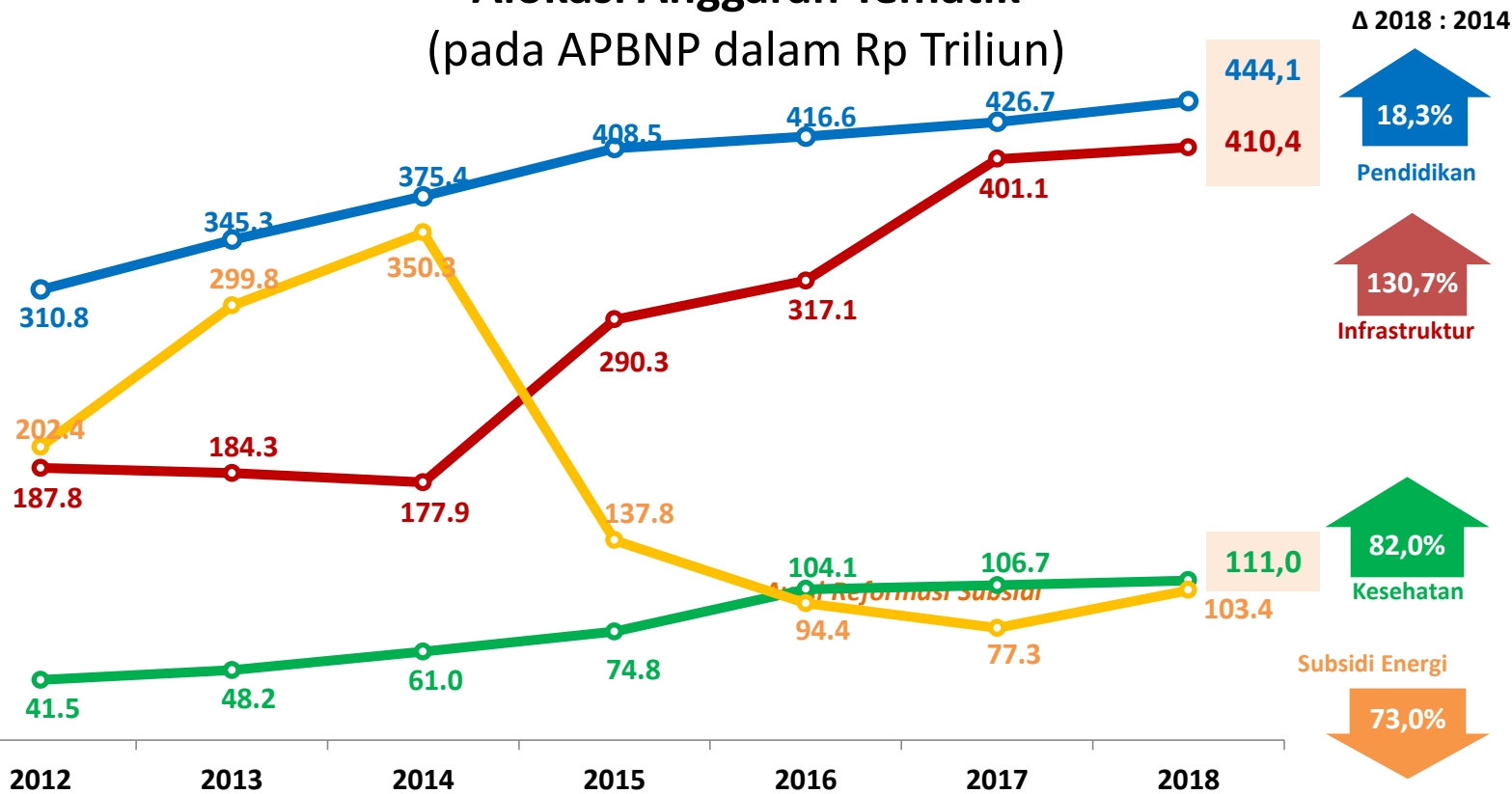
STRATEGI UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMERATAAN



PENGUATAN KUALITAS BELANJA

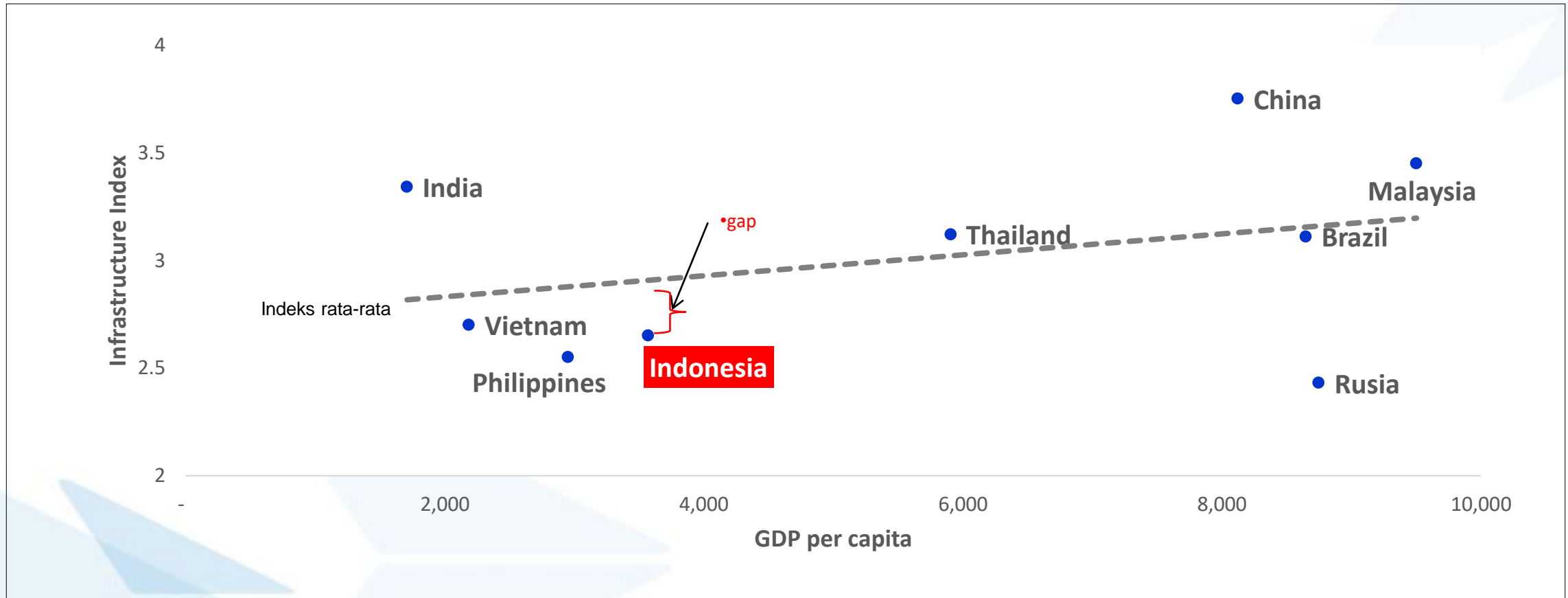
Realokasi subsidi energi ke belanja yang lebih produktif: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

Alokasi Anggaran Tematik (pada APBNP dalam Rp Triliun)



- Reformasi subsidi Tahun 2015, dengan implementasi subsidi tetap untuk solar (Rp. 1000/ltr) dan menghapus subsidi untuk premium. Mulai Juli 2016 subsidi tetap solar menjadi Rp. 500/ltr.
- Merelokasi penghematan subsidi untuk kegiatan prioritas dan produktif (Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan)
- Pemerintah masih konsisten untuk melanjutkan akselerasi pembangunan Infrastruktur

INDEKS INFRASTRUKTUR INDONESIA DIBAWAH RATA-RATA perlu upaya untuk mengejar ketertinggalan, agar tidak semakin jauh tertinggal



- Penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara.
- Pembangunan infrastruktur perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing.

INFRASTRUKTUR DAN DAYA SAING

Kondisi infrastruktur yang belum optimal menghambat daya saing

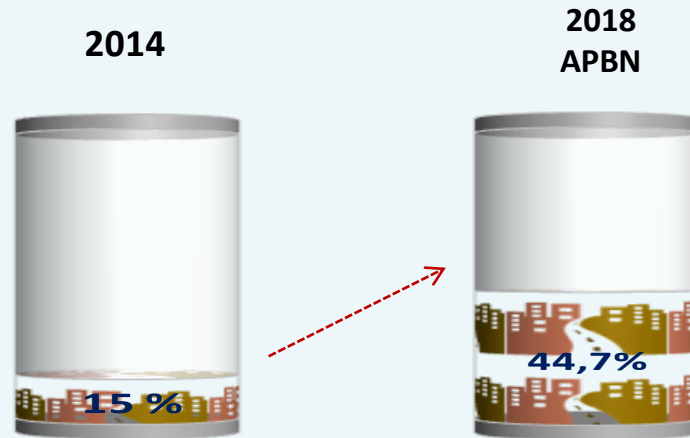


- Kondisi **Infrastruktur** masih menjadi **salah satu kendala utama** dalam menjalankan bisnis di Indonesia;
- **Peningkatan infrastruktur** akan sangat mendukung peningkatan daya saing Indonesia;
- Kualitas infrastruktur yang perlu ditingkatkan antara lain **jalan, pelabuhan, dan listrik**

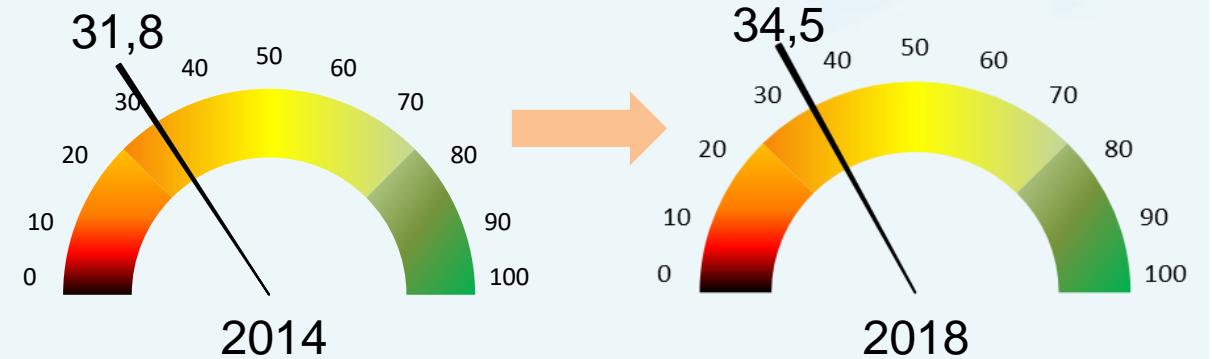
PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL

Perimbangan keuangan pusat dan daerah jauh lebih baik: kesenjangan menurun dan lebih merata

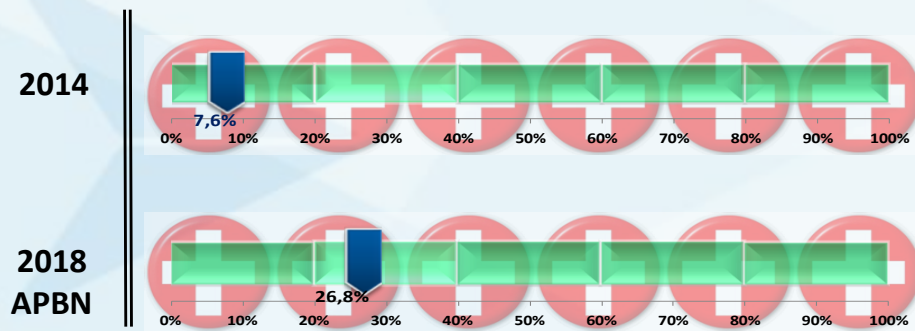
1 Porsi anggaran Infrastruktur melalui TKDD (%)



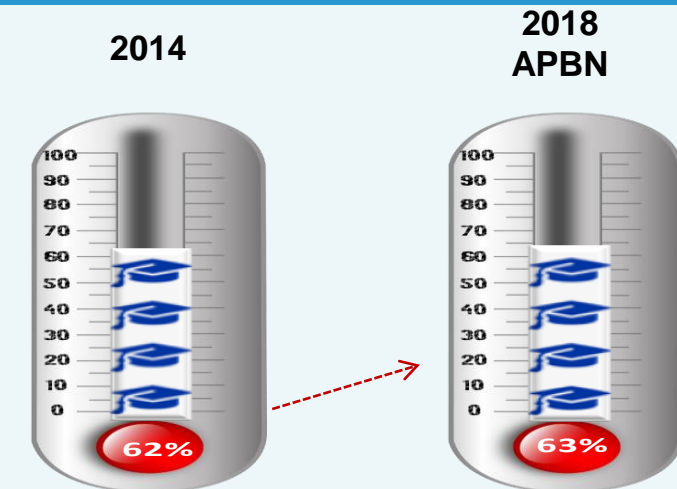
3 Porsi TKDD thd Belanja Negara (%)



2 Porsi anggaran kesehatan melalui TKDD (%)



4 Porsi anggaran pendidikan melalui TKDD (%)

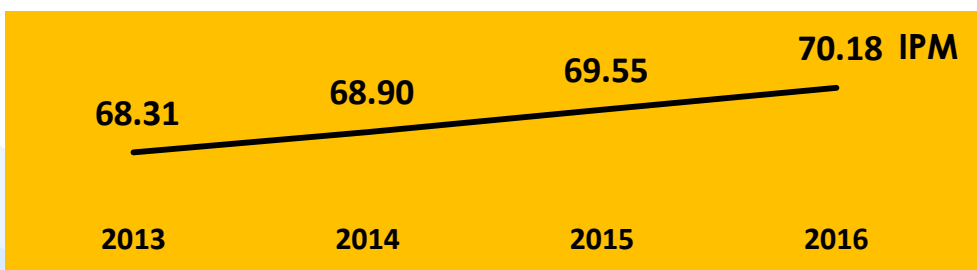
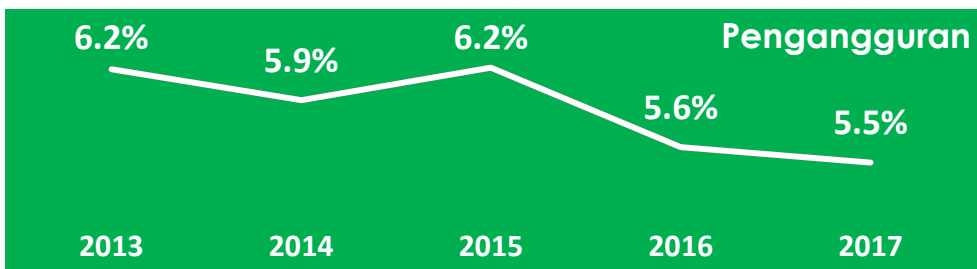
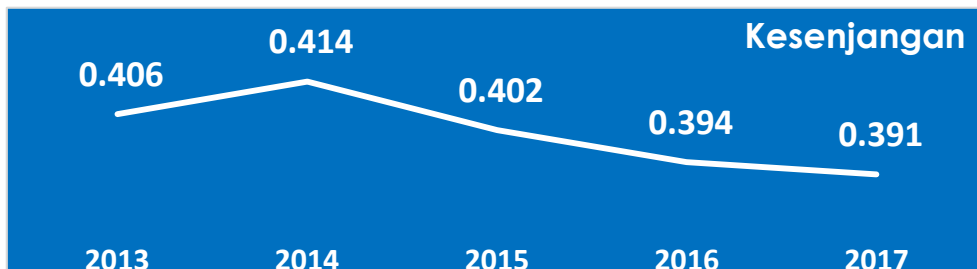
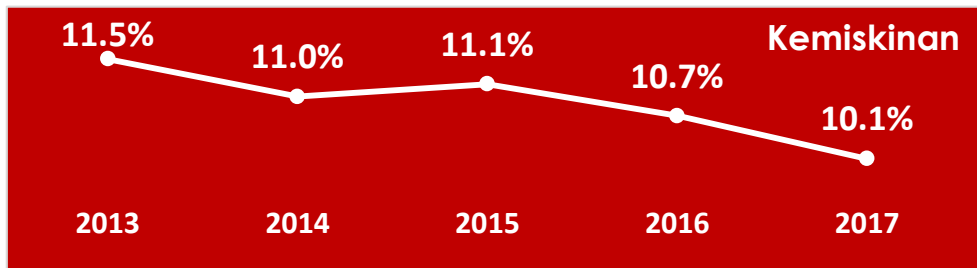




KINERJA PENGELOLAAN FISKAL FISKAL

INDIKATOR KESEJAHTERAAN MENUNJUKKAN PERBAIKAN

namun penurunan kemiskinan, pengangguran & kesenjangan melambat, perlu *improvement*



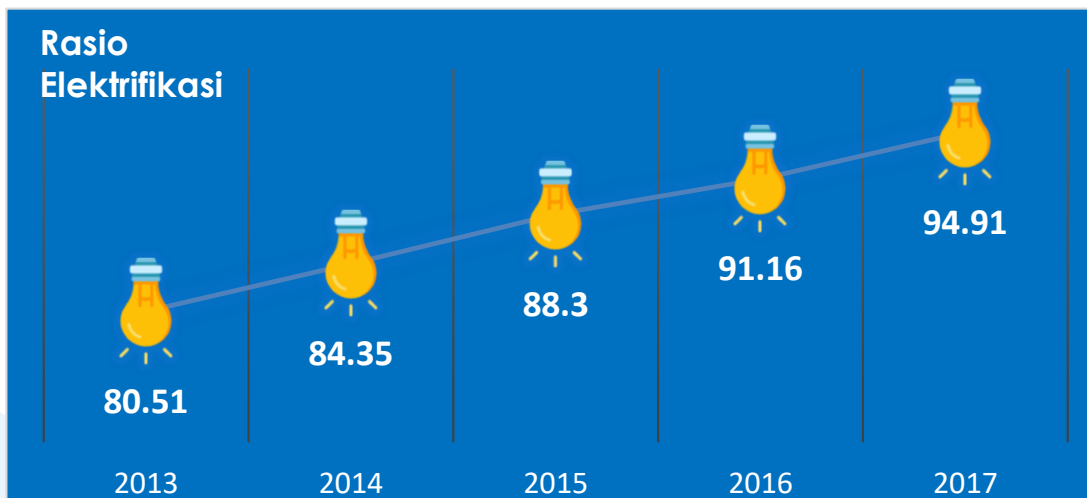
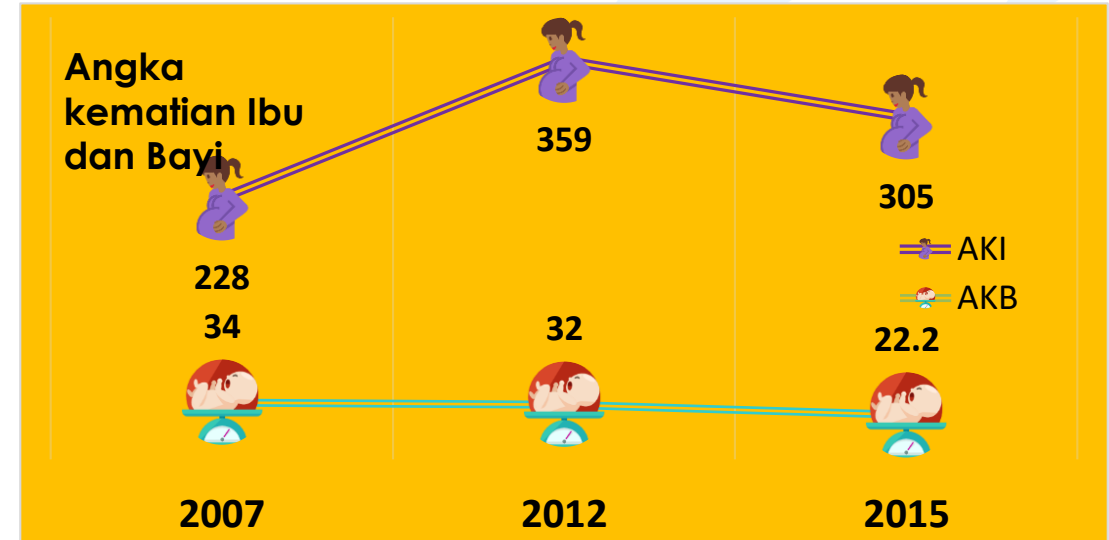
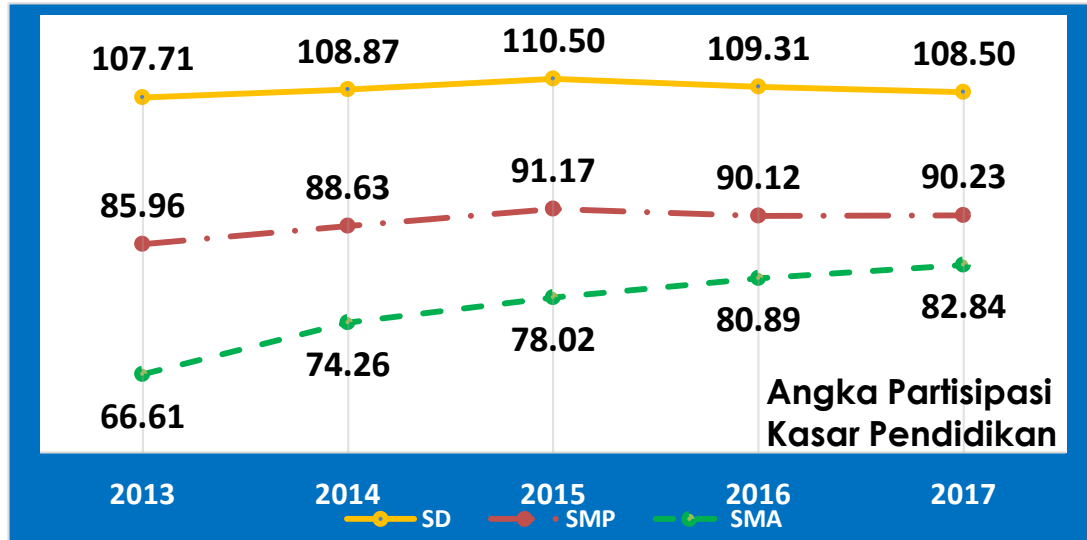
Indeks Kebahagiaan Indonesia



Indikator kesejahteraan membaik namun kurang signifikan sehingga **perlu mendorong efektifitas program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan: akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, sinergi antar program yang relevan.**

AKSES KE LAYANAN DASAR SEMAKIN MEMBAIK

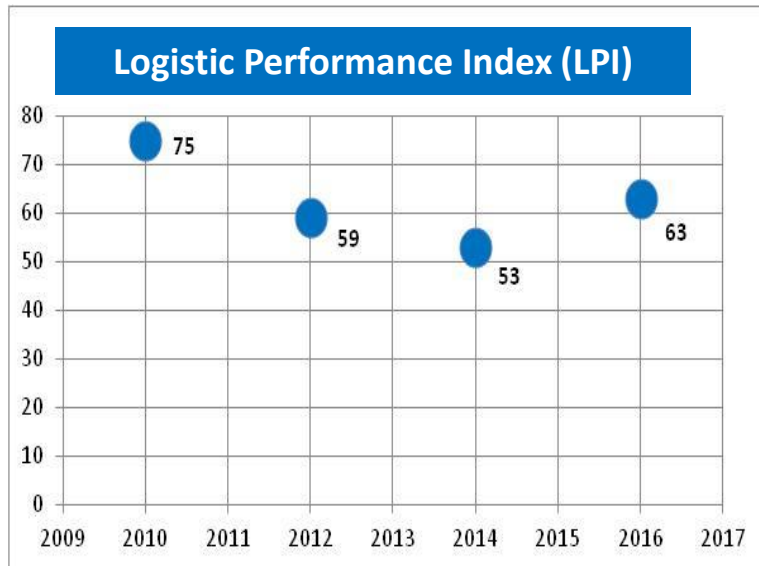
akses pendidikan, kesehatan dan listrik membaik namun masih terjadi kesenjangan antar wilayah



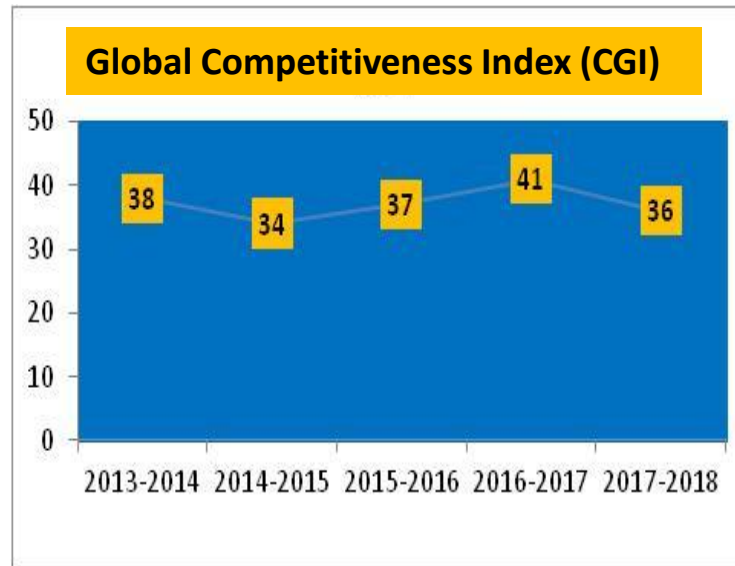
- Secara nasional akses ke pendidikan, kesehatan, dan listrik semakin membaik, tercermin dari meningkatnya APK pendidikan dan rasio elektrifikasi serta menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi
- Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antar wilayah yang masih perlu dibenahi.

DAYA SAING TERUS MENINGKAT

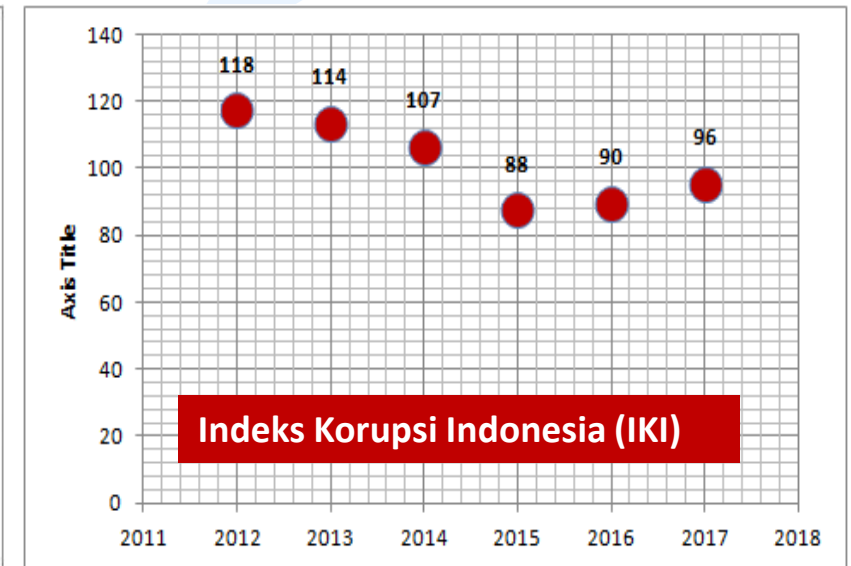
Pembangunan Infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing



Sumber: lpi.worldbank.org (2016), diolah



Sumber: World Economic Forum

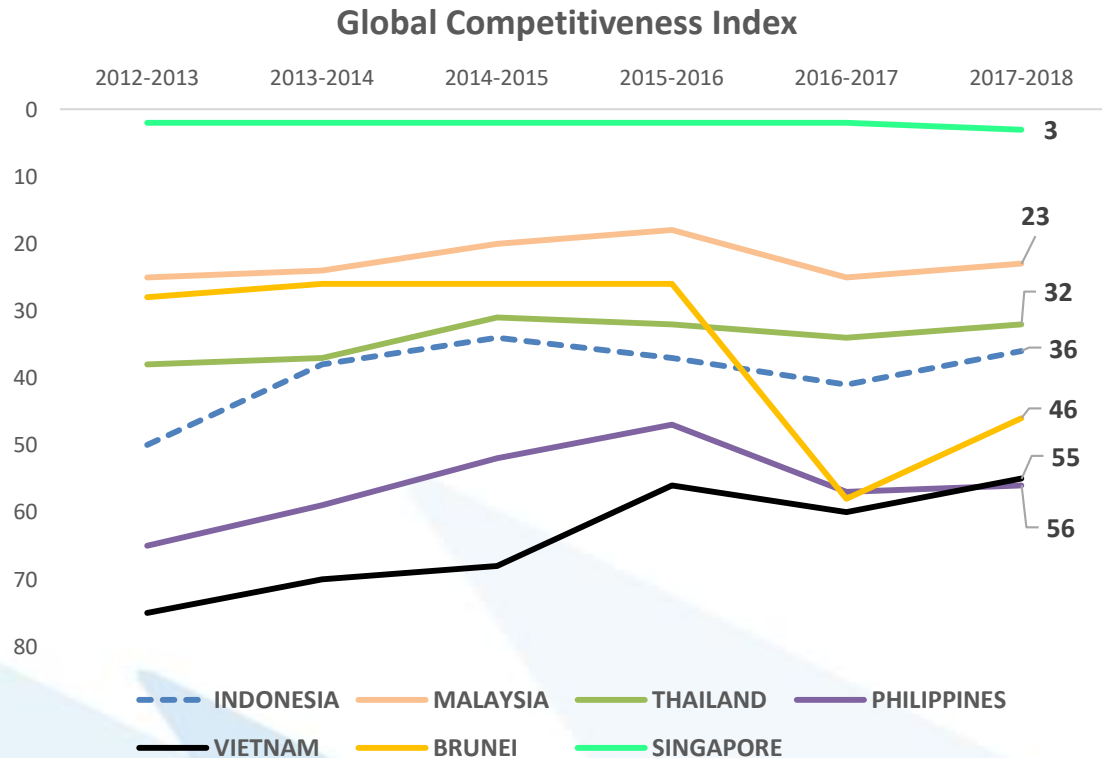


Sumber: Transparency International (2018)

- Pemerintah secara konsisten membangun infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
- Daya saing dan logistik cenderung membaik namun belum optimal dan masih terdapat ruang untuk perbaikan.
- Indeks persepsi korupsi cenderung membaik namun belum signifikan

INFRASTRUKTUR INDONESIA

Kondisinya membaik namun masih tertinggal dari negara lain



	INDONESIA	MALAYSIA	THAILAND	PHILIPPINES	VIETNAM	SINGAPORE	BRUNEI
Overall Infrastructure	68	21	67	113	89	2	51
Road	64	23	59	104	92	2	33
Railroad	30	14	72	91	59	4	N/A
Port	72	20	63	114	82	2	74
Electricity	86	36	57	92	90	3	53

- Indeks *competitiveness* Indonesia relatif membaik dari tahun sebelumnya dan diikuti dengan peringkat infrastruktur yang terus membaik;
- Walaupun membaik namun kondisi infrastruktur Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand;
- Peringkat infrastruktur naik 12 peringkat dari 80 menjadi 68, namun masih belum optimal dimana masih perlu perbaikan infrastruktur di sektor pelabuhan, jalan, dan ketenagalistrikan.

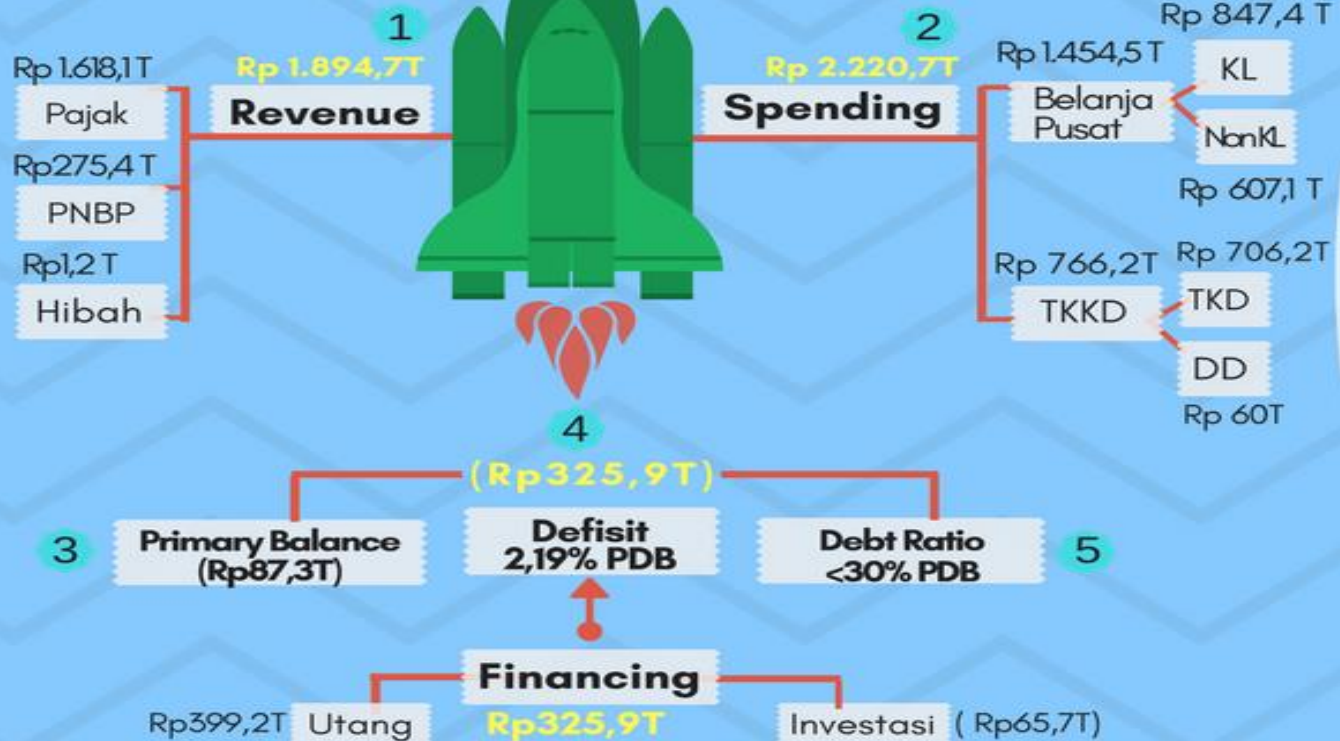
APBN untuk Indonesia yang Lebih Baik

"Stimulus Perekonomian dan Mewujudkan Kesejahteraan"



Optimalisasi Pendapatan

1. Perluasan basis pajak, penggalan potensi (intensifikasi & eksifikasi)
2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. Penguatan sistem informasi dan akurasi data (AEoI), serta kualitas SDM
4. Insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis
5. Optimalisasi pengelolaan aset & SDA



Quality of spending

1. Efisiensi belanja barang
2. Penguatan Belanja Produktif;
3. Efektifitas program perlindungan sosial (sinergi subsidi & bansos)
4. Refocusing (infrastruktur, kesehatan & pendidikan)
5. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO



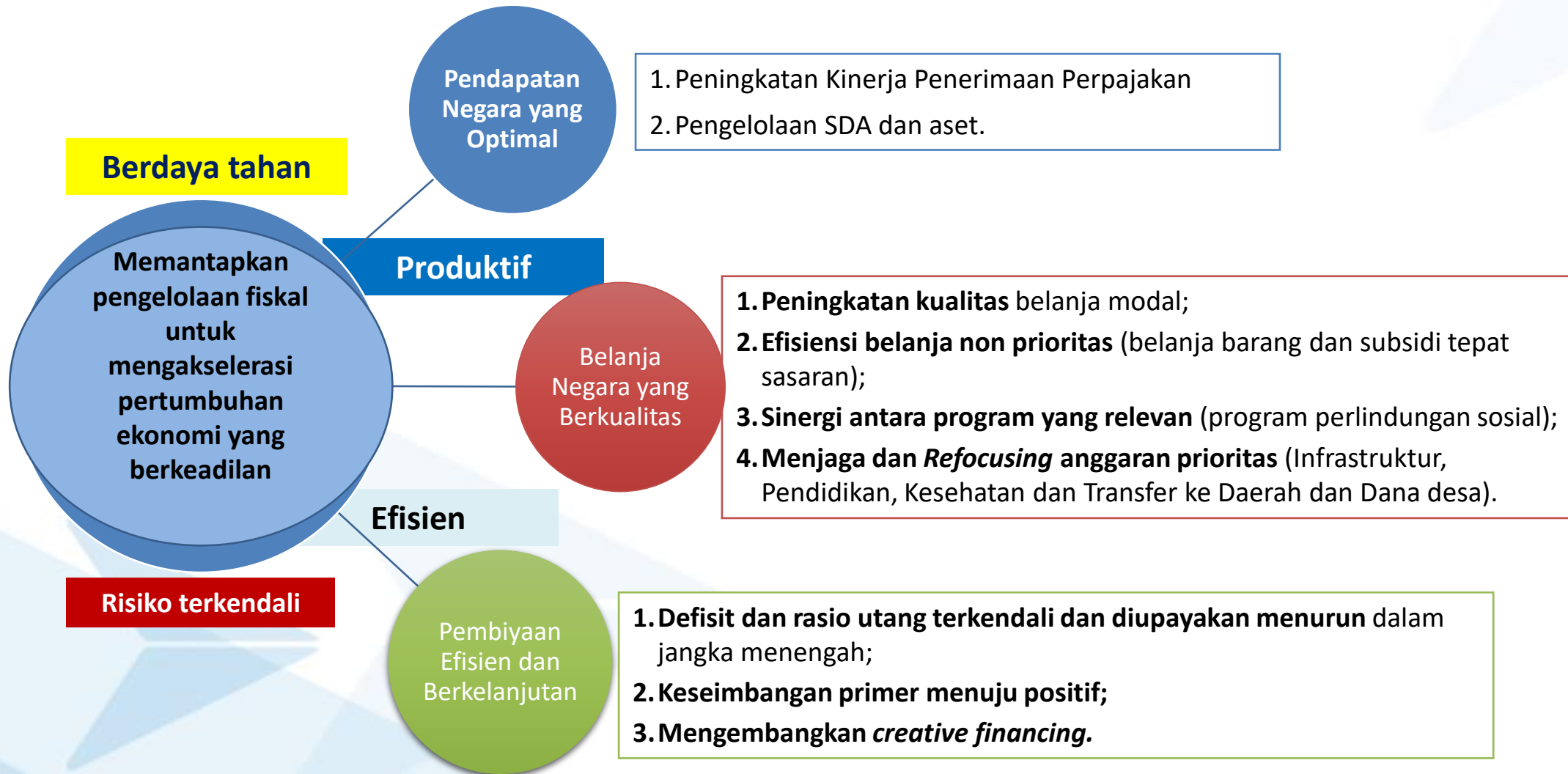


TERIMA KASIH



ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2018

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2018



KEBIJAKAN STRATEGIS 2018

mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan

Mitigasi risiko Fiskal

- SAL (fiscal buffer);
- Dana cadangan risiko fiskal;
- Payung hukum (pasal krisis);
- BSF.

Perbaikan kualitas Pelayanan Publik

- Kesejahteraan aparatur negara & pensiunan;
- Kenaikan uang lauk pauk;
- Pemantapan reformasi brokrasi

Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan: Rp283,8T

- PKH: 10 juta KPM (Rp17,1T);
- BidikMisi: 401,5 ribu Mhs
- JKN :92,4 jt jiwa (Rp25,5T)
- PIP:19,6 jt siswa (Rp10,5T)
- bantuan pangan:15,6 juta KPM
- Dana desa:74.958 desa (Rp60T)

Kesehatan berkualitas: Rp111,0T

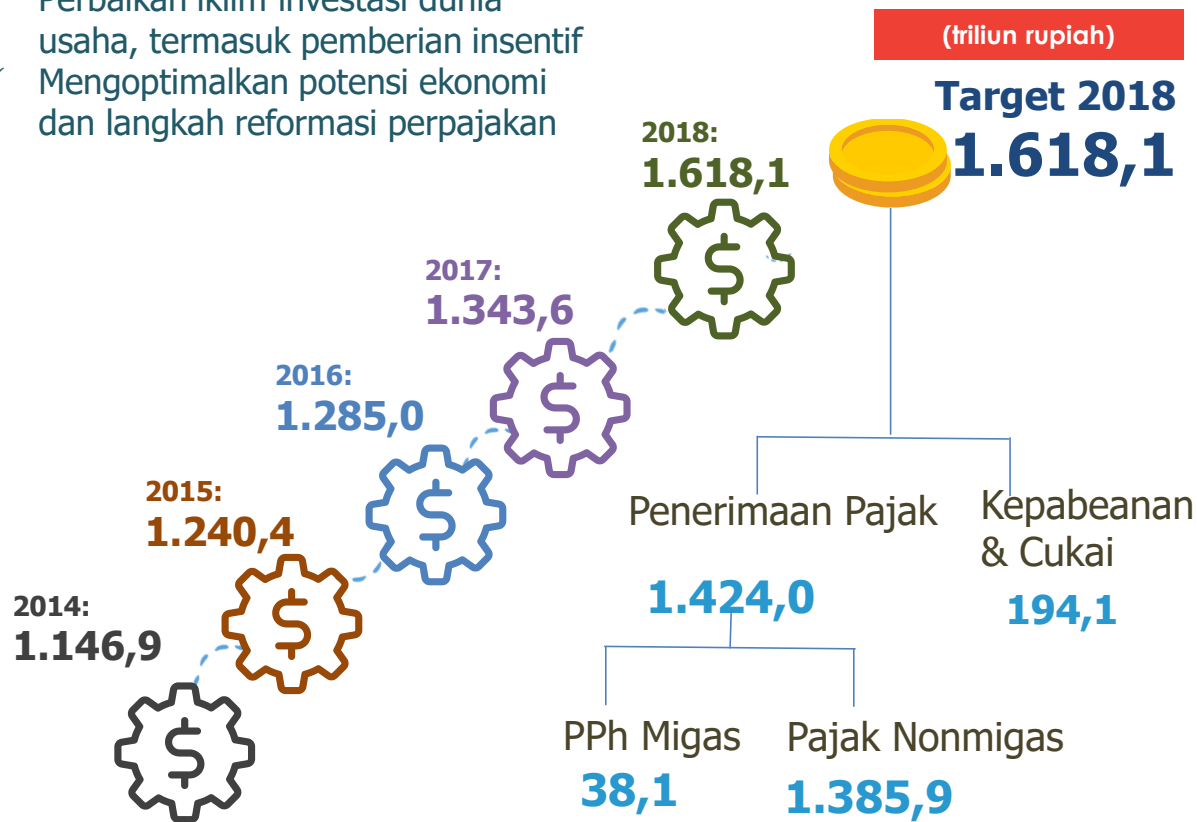
- PBI (JKN):92,4 juta jiwa
- Sarana Faskes
- Imunisasi anak(0-11 th): 92,5%



OPTIMALISASI PENERIMAAN PERPAJAKAN 2018

Penggalian potensi, peningkatan basis pajak dan kepatuhan pajak

- ✓ Perbaiki iklim investasi dunia usaha, termasuk pemberian insentif
- ✓ Optimalkan potensi ekonomi dan langkah reformasi perpajakan



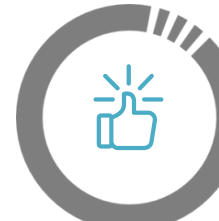
● Pertumbuhan (%)

Tax Ratio 2018

11,6% PDB

Termasuk SDA migas & tambang

Langkah Perbaikan Perpajakan



Automatic Exchange of Information (AEOI)

- meningkatkan basis pajak
- mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*Base Erosion Profit Shifting*)



Data Dan Sistem Informasi Perpajakan

up to date dan terintegrasi a.l. melalui *e-filing*, *e-form* dan *e-faktur*.



Kepatuhan Wajib Pajak

membangun kesadaran pajak (*sustainable compliance*) a.l. melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, dan *outbond call*.



Insentif Perpajakan

- *tax holiday* dan *tax allowance*
- reviu kebijakan *exemption tax* pada beberapa barang kena PPN.



SDM dan regulasi

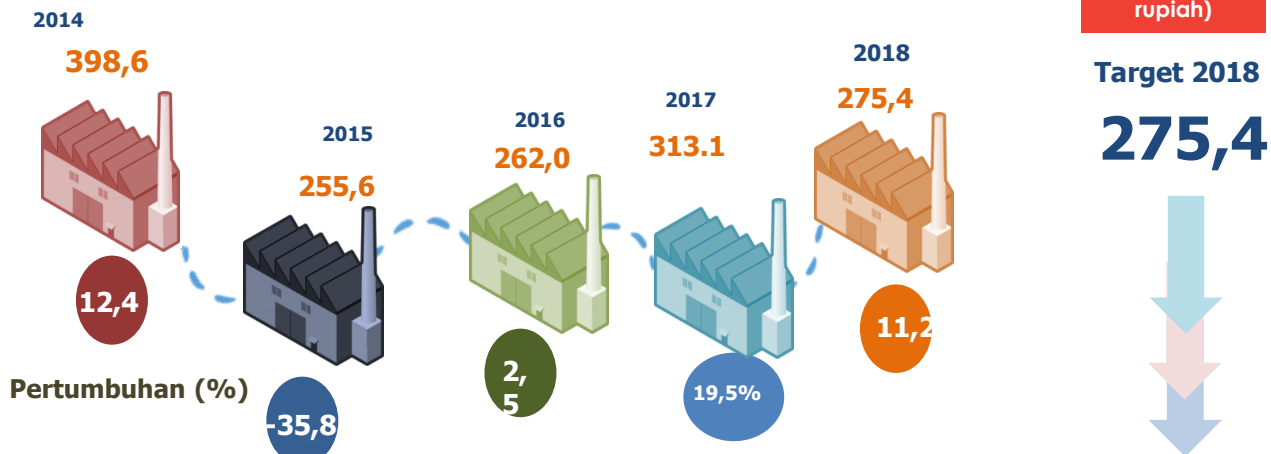
Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi



OPTIMALISASI PNBP

Peningkatan pengelolaan asset negara dan SDA dengan menjaga kualitas pelayanan public dan konservasi lingkungan

Didukung Langkah Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan SDA, serta perbaikan pelayanan publik



Langkah Kebijakan PNBP



Penyempurnaan peraturan
Revisi UU PNBP dan PP tentang jenis dan tarif PNBP.



Peningkatan Pengawasan pengelolaan

- Penyetoran sesuai penerimaannya
- Penagihan piutang
- Menindaklanjuti hasil audit



Optimalisasi PNBP

- Efisiensi dan efektifitas pengelolaan SDA
- Peningkatan kinerja BUMN
- Efisiensi operasional PNBP
- Revisi kontrak → efisiensi *cost recovery*
- Menggali potensi baru



Perbaikan Pelayanan Publik

- Transparansi dan kemudahan
- Pemanfaatan IT
- Perbaikan pengelolaan PNBP

Pendapatan SDA

111,8

SDA Migas 114,3

SDA Nonmigas 29,3

Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

44,3

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN:

Perbankan **10,5**

Non Perbankan **33,8**

PNBP Lainnya

109,3

3 K/L Terbesar:

Kemkominfo

Polri

Kemenhub

Pendapatan BLU

44,7

3 K/L dengan Pendapatan BLU Terbesar:

Kemenkeu

Kemenkes

Kemenristek Dikti

BELANJA PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

BELANJA PEMERINTAH DI TAHUN 2018 DIFOKUSKAN UNTUK PENINGKATAN SDM, INFRASTRUKTUR DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

(triliun rupiah)

Kemiskinan dan Kesenjangan

283,7 ¹⁾



Program perlindungan sosial (PKH) --> Naik dari 6 juta menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat



Perluasan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) : dari rastra

Pelayanan Kesehatan : PBI 92,4 juta jiwa



Pendidikan Program Indonesia Pintar : 19,7 juta siswa Bidik misi : 401,5 ribu mahasiswa

1) Termasuk Dana Desa dan subsidi (di luar subsidi pajak)

Infrastruktur

410,7 ²⁾



Pembangunan Jalan 865 km



Pembangunan Irigasi 781 km



Pembangunan Rusun 13.405 unit



Rasio Elektrifikasi 95,15 %

2) Angka sementara, termasuk TkDD dan Pembiayaan

Sektor Unggulan

34,8 ³⁾



Pertanian
• Peningkatan Produksi pangan dan pembangunan sarpras
• Pengembangan hortikultura



Pariwisata
• Pengembangan 10 destinasi wisata
• Peningkatan wisatawan
• Promosi pariwisata



Perikanan
• Peningkatan daya saing produk olahan perikanan
• Bantuan kapal nelayan 1048 unit
• Kelestarian lingkungan

3) Alokasi Kementan, KKP, dan Kemenpar

Aparatur Negara dan Pelayanan Masyarakat

365,8 ⁴⁾



Peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik



Kesejahteraan aparatur dan pensiunan



Kenaikan uang lauk pauk TNI/Polri
Rp5 ribu dari Rp55.000 menjadi Rp60.000/org/hari



Perbaiki sistem dan manfaat pensiun aparatur negara

4) Termasuk pensiunan aparat pemda

Pertahanan Keamanan dan Demokrasi

220,8 ⁵⁾



Pertahanan
Pencapaian MEF tahap 2 dan pengembangan industri pertahanan



Keamanan
Pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penyelidikan/penyidikan pidana

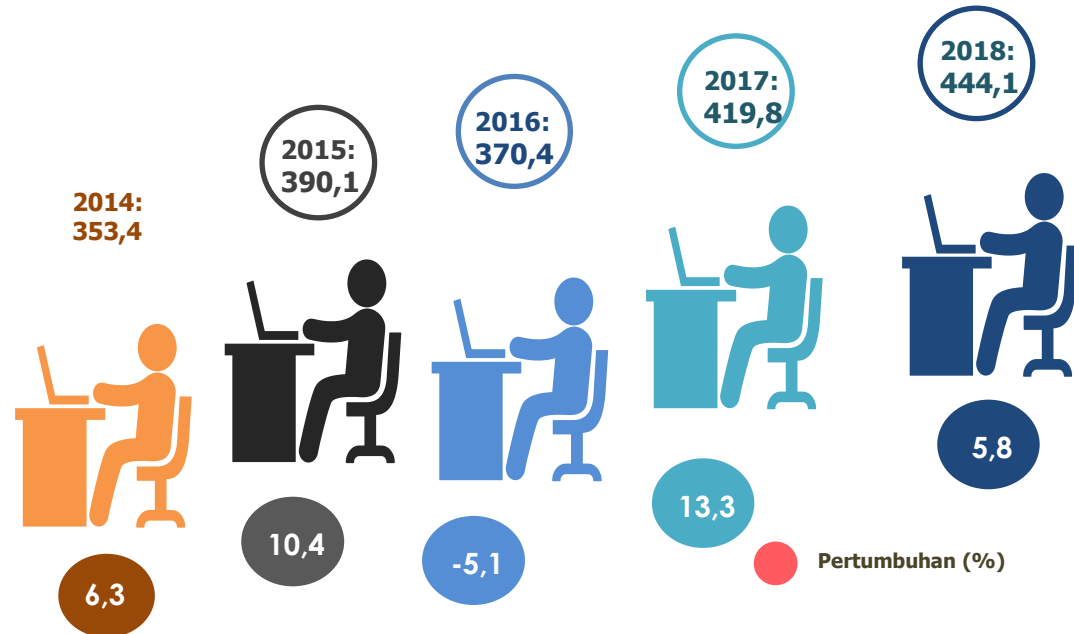


Demokrasi
Penyelenggaraan pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019

5) Alokasi Kemenhan, Polri, KPU, dan Bawaslu

MENJAGA ANGGARAN PENDIDIKAN 20%

Fokus meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan



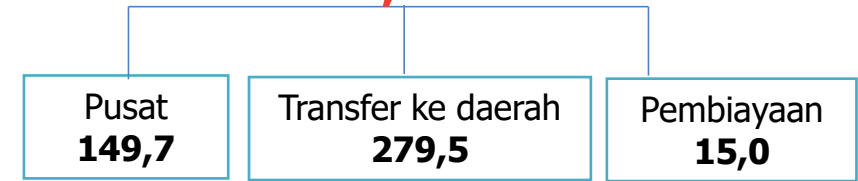
Arah kebijakan

1. Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.
2. Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah.
3. Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda.
4. Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*).
5. Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk *sustainable education*.
6. Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.

Alokasi 2018

444,1

(triliun rupiah)



Sasaran Target (*sementara*)

Program Indonesia Pintar	19,7 Juta Jiwa	
Bantuan Operasional Sekolah	56 juta jiwa	
Beasiswa Bidik Misi	401,5 ribu mahasiswa	
Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas	61,2 ribu	
Tunjangan Profesi Guru		
• Non PNS	435,9 ribu guru	
• PNS	257,2 ribu guru	
• PNSD	1,2 juta guru	

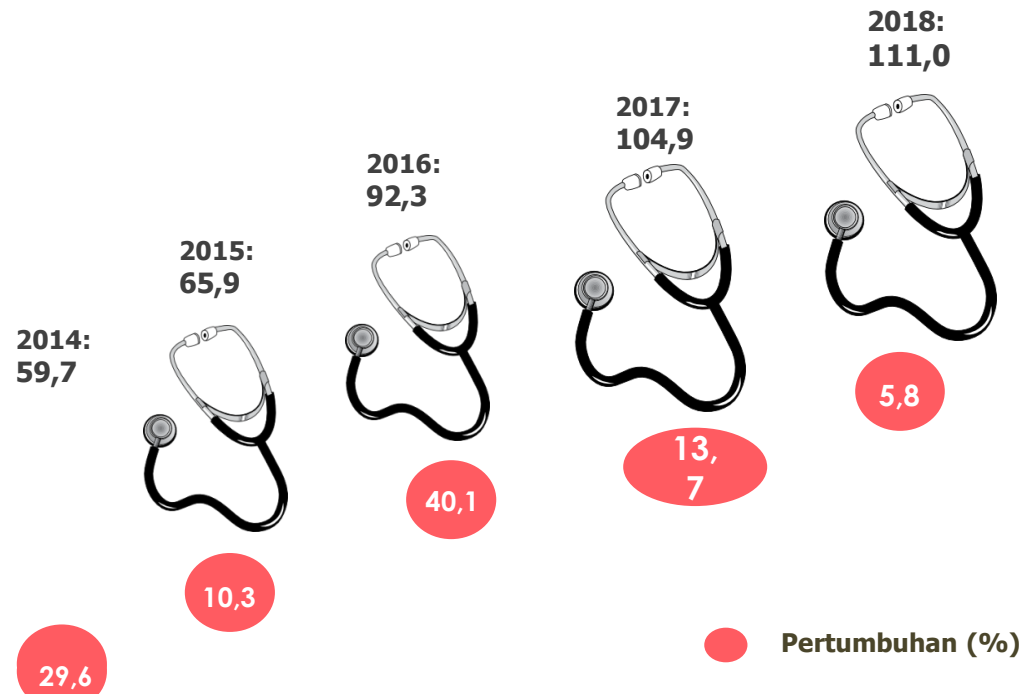
Indikator Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	89,7% 88,1%	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	65,3% 63,4%
---	----------------	---	----------------

● 2017 ● 2018

MENJAGA ANGGARAN KESEHATAN 5%

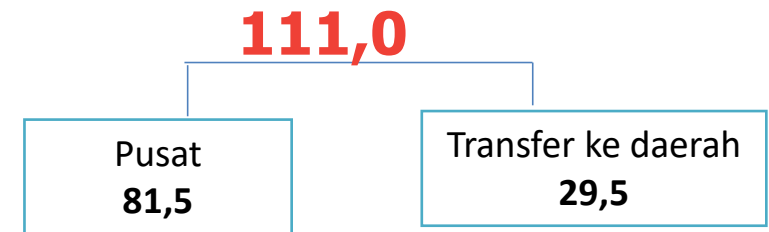
Fokus: meningkatkan *supply side*, akses dan mutu layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga keberlanjutan JKN



Arah kebijakan

- ❖ Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan.
- ❖ Penguatan program promotif dan preventif yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui.
- ❖ Meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program JKN.
- ❖ Meningkatkan peran Pemda untuk *supply side* dan peningkatan mutu layanan.

Alokasi 2018



Sasaran Target (*sementara*)

	Program Indonesia Sehat	92,4 juta jiwa
	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR	1,8 juta orang
	Penyediaan sarana fasilitas kesehatan yang berkualitas	49 RS/Balkes
	Imunisasi untuk anak usia 0-11 bulan	92,5%
	Sertifikasi obat dan makanan	74,0 ribu

Indikator Kesehatan

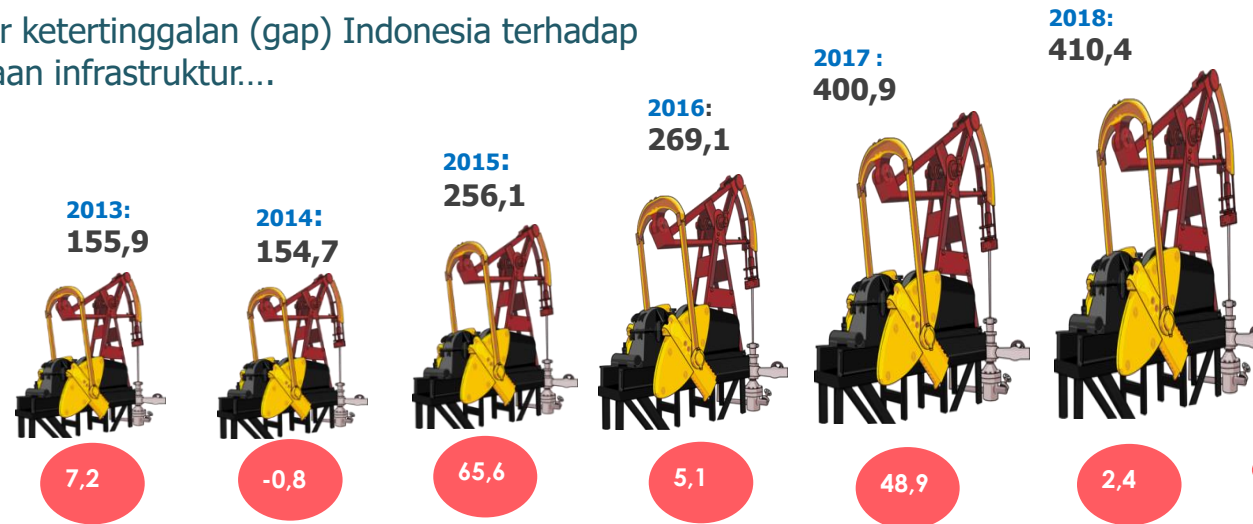
Stunting	28,8%	Persalinan di fasilitas kesehatan	86%
	29,6%		83%
Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas			

● 2017

INFRASTRUKTUR UNTUK DAYA SAING

Produktifitas, konektifitas, aksesabilitas dan mobilitas

Mengejar ketertinggalan (gap) Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur...



Alokasi 2018

(triliun rupiah)

410,4 *)

Kemen PUPR
107,1 **)

Kemenhub
48,2 **)

DAK
33,9

Investasi Pemerintah
(PMN & LMAN)
41,5

*) angka sementara

**) total pagu

Sasaran

Pembangunan dan Preservasi Jalan

- Pembangunan Jalan Baru **865 km**
- Pembangunan jalan tol **25 km**
- Pembangunan Jembatan **8.695 m**

Pembangunan jalur KA 620 km'sp



Pembangunan LRT (lanjutan) 23 km'sp



Pembangunan bandara baru 8 lokasi (penyelesaian dan lanjutan)



Informasi dan Telekomunikasi

- Pembangunan desa broadband terpadu **100 lokasi**
- Pembangunan BTS di daerah blankspot, terutama daerah 3T **380 lokasi**



Penyediaan dan Peningkatan kualitas Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

- Pembangunan Rusun **13.405 unit**
- Bantuan Stimulan (peningkatan/ pembangunan) **180,0 ribu unit**

ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Penanggulangan kemiskinan dan dukungan pada masyarakat berpendapatan rendah terus diperkuat melalui program bantuan sosial, subsidi, dan dana desa



Subsidi

145,5



PKH

17,3



Program Indonesia
Pintar

10,5



JKN
bagi
warga
miskin/P
BI

25,5



Bantuan
Pangan

20,8



Bidik
Misi

4,1



Dana
Desa

60,0
triliun

*) diluar subsidi pajak

2018

283,7
triliun

target

- Program Keluarga Harapan
10 juta RTS

- Bantuan Pangan
15,6 juta KPM

- Perluasan Bantuan pangan non tunai (pengalihan dari subsidi rastra ke bansos)

- Penerima Bantuan Iuran dalam rangka JKN
92,4 juta jiwa

- Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
117,7 ribu KK

- Program Indonesia Pintar
19,7 juta siswa

- Dana Desa
74.958 Desa

UNTUK MITIGASI RISIKO APBN 2018

Defisit diperkirakan sedikit melebar dan negatif keseimbangan primer meningkat

	APBN	Outlook
Growth	5,4	↓ 5,2
Inflasi	3,5	3,5
Kurs	13.400	↓ 13.550
SPN 3 bl	5,2	↓ 5,1
ICP	48	↑ 55
Lifting minyak	800	↓ 777
Lifting gas	1.200	1.200



- Kurang Optimalnya Pajak
- PNBP meningkat seiring dengan kenaikan komoditas
- Peningkatan belanja (subsidi dan pembayaran bunga utang)

STRATEGI MITIGASI

Cadangan risiko fiskal 2018 → Rp 11,68 T	SAL 2018:Rp139,4T (LKPP 2016 :Rp113,9T + SILPA 2017 :25,5T)	Pasal Mengenai antisipasi Krisis (fleksibilitas APBN)	Bond Stabilization Framework
--	--	---	------------------------------

Realisasi APBN-P 2017

URAIAN	2017		2018	
	APBN-P	Run 30 Jan (OMSPAN)	APBN	% thd PDB
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.736.060,1	1.665.214,3	1.894.720,3	12,76
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.732.952,0	1.655.487,6	1.893.523,5	12,75
1. Penerimaan Perpajakan	1.472.709,9	1.343.614,6	1.618.095,5	10,90
a. Pajak Dalam Negeri	1.436.730,9	1.304.408,2	1.579.395,5	10,64
i. Pajak penghasilan	783.970,3	646.890,3	855.133,5	5,76
1. PPh Migas	41.770,3	50.316,2	38.134,1	0,26
2. PPh Non-Migas	742.200,0	596.574,1	816.999,4	5,50
ii. Pajak pertambahan nilai	475.483,5	480.721,3	541.801,1	3,65
iii. Pajak bumi dan bangunan	15.412,1	16.770,3	17.369,1	0,12
v. Cukai	153.165,0	153.287,7	155.400,0	1,05
vi. Pajak lainnya	8.700,0	6.738,5	9.691,8	0,07
b. Pajak Perdagangan Internasional	35.979,0	39.206,4	38.700,0	0,26
i. Bea masuk	33.279,0	35.058,8	35.700,0	0,24
ii. Pungutan Ekspor/Bea Keluar	2.700,0	4.147,6	3.000,0	0,02
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.242,1	311.873,0	275.428,0	1,85
a. Penerimaan SDA	95.643,1	111.791,2	103.674,9	0,70
i. SDA Migas	72.207,9	82.501,8	80.349,0	0,54
- Minyak bumi	57.406,8	61.345,2	59.582,7	0,40
- Gas alam/Gas bumi	14.801,1	21.156,6	20.766,3	0,14
ii. Non Migas	23.435,3	29.289,4	23.325,8	0,16
b. Bagian Laba BUMN	41.000,0	44.283,5	44.695,4	0,30
c. PNBP Lainnya	85.057,6	108.143,5	83.753,1	0,56
d. Pendapatan BLU	38.541,4	47.654,8	43.304,6	0,29
II. Hibah	3.108,1	9.726,7	1.196,9	0,01
B. Belanja Negara	2.133.295,9	2.001.631,2	2.220.657,0	14,95
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.366.956,6	1.259.638,9	1.454.494,4	9,79
Belanja K/L	798.585,3	759.800,0	847.435,2	5,71
Belanja non K/L	568.371,3	499.900,0	607.059,2	4,09
1. Belanja Pegawai	340.411,5	312.728,6	365.828,9	2,46
2. Belanja Barang	318.783,9	290.530,6	340.130,2	2,29
3. Belanja Modal	206.194,4	204.209,5	203.879,4	1,37
4. Pembayaran Bunga Utang	219.196,3	216.568,0	238.607,1	1,61
i. Utang Dalam Negeri	202.878,2	199.977,3	222.315,7	1,50
ii. Utang Luar Negeri	16.318,1	16.590,6	16.291,4	0,11
5. Subsidi	168.876,8	166.393,6	156.228,1	1,05
i. Subsidi Energi	89.864,0	97.642,1	94.525,1	0,64
- Subsidi BBM	44.488,8	47.046,7	46.865,1	0,32
- Subsidi Listrik	45.375,2	50.595,3	47.660,0	0,32
ii. Subsidi Non Energi	79.012,8	68.751,5	61.703,0	0,42
6. Belanja Hibah	5.532,2	5.445,6	1.460,8	0,01
7. Bantuan Sosial	58.087,2	55.297,3	81.012,5	0,55
8. Belanja Lain-lain	49.874,3	8.465,8	67.237,4	0,45
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	766.339,3	741.992,4	766.162,6	5,16
1. Transfer Ke Daerah	706.339,3	682.225,8	706.162,6	4,76
a. Dana Perimbangan	678.596,0	654.482,5	676.603,0	4,56
a. Dana Bagi Hasil	95.377,2	88.232,2	89.225,3	0,60
b. Dana Alokasi Umum	398.582,3	398.582,3	401.489,6	2,70
c. Dana Alokasi Khusus/Transfer Khusus	184.636,5	167.668,0	185.888,1	1,25
b. Dana Insentif Daerah	7.500,0	7.500,0	8.500,0	0,06
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	20.243,3	20.243,3	21.059,6	0,14
d. Dana Transfer Lainnya	-	-	0,0	0,00
2. Dana Desa	60.000,0	59.766,6	60.000,0	0,40
III Suspend	-	-	-	-
C. Keseimbangan Primer	(178.039,4)	(119.849,0)	(87.329,5)	(0,59)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(397.235,8)	(336.417,0)	(325.936,6)	(2,19)
% to GDP	(2,92)	(2,48)	(2,19)	(0,00)
E. Pembiayaan (I + II + III + IV + V)	397.235,8	361.927,2	325.936,6	2,19
E. Pembiayaan (I + II + III + IV + V)	397.235,8	361.927,2	325.936,6	2,19
I. Pembiayaan Utang	461.343,6	423.732,0	399.219,4	2,69
a. Surat Berharga Negara (neto)	467.314,3	441.826,3	414.520,7	2,79
b. Pinjaman	(5.970,7)	(18.094,3)	(15.301,32)	(0,10)
II. Pembiayaan Investasi	(59.733,8)	(59.754,1)	(65.654,3)	(0,44)
III. Pemberian Pinjaman	(3.668,7)	(1.407,1)	(6.690,1)	(0,05)
IV. Kewajiban Penjaminan	(1.005,4)	(1.005,4)	(1.121,3)	(0,01)
V. Pembiayaan Lainnya	300,0	361,8	183,0	0,00
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	0,0	25.510,3	0,0	-

Kinerja APBN-P 2017 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Keberlanjutan fiscal terjaga : defisit lebih rendah, rasio utang terjaga dan negative *primary balance* menurun;

Didukung oleh terjaganya konsumsi domestik, membaiknya harga komoditas dan ICP, dan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional

Meskipun adanya tekanan dari sisi makro, defisit masih terjaga dalam batas aman 2,48% PDB lebih rendah dari APBN=P 2,92% PDB

Revenue and expenditure profile by region

Effective expenditure policy as a tool to promote equality across Indonesia

SUMATRA		IDR tn
Revenue		141.1
a. Tax		66.9
b. Custom & Excise		6.8
c. Non Tax Revenue		70.4
Expenditure		232.3
a. Transfer to Region		176.1
b. Ministerial Spending		56.2
Nett		-88.2

KALIMANTAN		IDR tn
Revenue		86.0
a. Tax		32.0
b. Custom & Excise		1.1
c. Non Tax Revenue		52.9
Expenditure		93.9
a. Transfer to Region		73.7
b. Ministerial Spending		20.3
Nett		-7.9

SULAWESI		IDR tn
Revenue		19.7
a. Tax		16.6
b. Custom & Excise		0.6
c. Non Tax Revenue		2.5
Expenditure		104.5
a. Transfer to Region		73.3
b. Ministerial Spending		31.2
Nett		-84.8

PAPUA & MALUKU		IDR tn
Revenue		18.4
a. Tax		10.7
b. Custom & Excise		1.7
c. Non Tax Revenue		6.0
Expenditure		89.6
a. Transfer to Region		71.7
b. Ministerial Spending		17.9
Nett		-71.3

JAVA		IDR tn
Revenue		1.143.2
a. Tax		884.9
b. Custom & Excise		161.6
c. Non Tax Revenue		96.6
Expenditure		302.8
a. Transfer to Region		201.8
b. Ministerial Spending		101
Nett		840.4

BALI & NUSRA		IDR tn
Revenue		15.5
a. Tax		11.7
b. Custom & Excise		1.5
c. Non Tax Revenue		2.3
Expenditure		56.4
a. Transfer to Region		39.5
b. Ministerial Spending		17.0
Nett		-40.9

Notes:

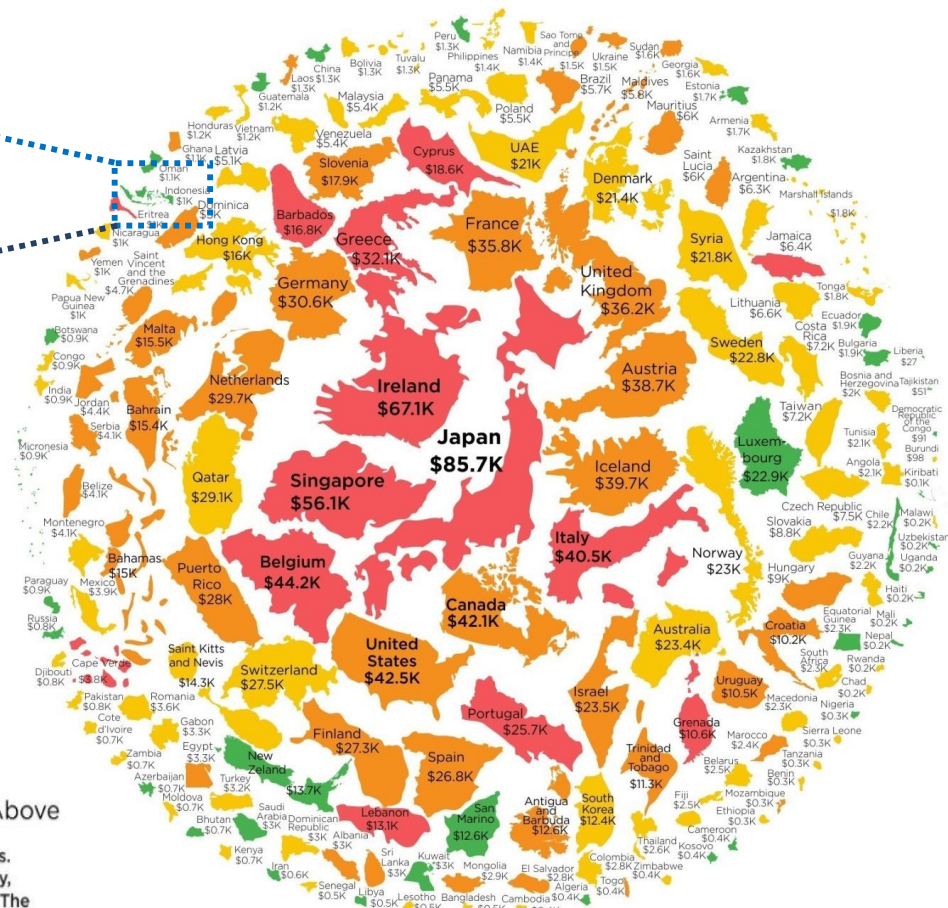
1. Average data 2014 - 2016
2. Revenue → amount collected from certain region for central government budget
3. Expenditure → amount spent for certain region from central government budget
4. Figure in IDR tn

Source: Ministry of Finance

Berapa utang yang harus ditanggung oleh setiap warga negara?



“Compared to other emerging and developed countries, Indonesia has even lower debt percapita...”



Public Debt as Percentage of GDP

■ Less than 30%
 ■ 30% - 60%
 ■ 60% - 100%
 ■ 100% - Above

How to read: The more each citizen of a country owes, the closer to the center of the map the country is. Countries appear bigger as debt per capita to pay down countries' debt is higher. e.g. Japan. Conversely, countries where debt per capita is lower appear smaller in size and farther from the center. e.g. Yemen. The colour of the country indicates the public debt as a percentage of GDP.

Sources: <https://howmuch.net/articles/per-capita-debt>
International Monetary Fund, World Bank and CIA World Factbook

Source: howmuch.net